

RENCANA STRATEGIS

BALAI POM DI TASIKMALAYA
2025-2029



2025
2029



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI TASIKMALAYA
NOMOR HK.02.02.14B.12.25.93 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI TASIKMALAYA TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai di Tasikmalaya tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI POM DI TASIKMALAYA TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI TASIKMALAYA TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai POM di Tasikmalaya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Renstra Balai POM di Tasikmalaya memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai POM di Tasikmalaya untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

- Ketiga : Renstra Balai POM di Tasikmalaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai POM di Tasikmalaya bagi dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan di Balai POM di Tasikmalaya.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal : 05 Desember 2025
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI TASIKMALAYA ,



ILTIZAM NASRULLAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat Rahmat-Nya kegiatan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025-2029 diselesaikan. Rencana Strategis Balai POM di Tasikmalaya merupakan dokumen reviu perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran program/kegiatan, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya Balai POM di Tasikmalaya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025-2029. Penyusunan renstra ini mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 untuk memberikan arah yang jelas sehingga tercipta sumber daya yang efektif dan efisien dalam pengembangan/peningkatan peran Balai POM di Tasikmalaya dalam pembangunan nasional, utamanya pengawasan Obat dan Makanan di wilayah priangan timur.

Dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan, Balai POM di Tasikmalaya mengedepankan kolaborasi dan sinergi dengan seluruh sub-bagian Pengawas Obat dan Makanan diantaranya produsen, masyarakat dan pemerintah. Renstra Balai POM di Tasikmalaya tahun 2025-2029 diharapkan dapat menjadi rujukan pemangku kepentingan dalam membuat program dan kegiatan yang bersinergi dengan Pengawas Obat dan Makanan. Diharapkan output serta outcome dari program-program yang telah disusun tersebut dapat menjadi bentuk konket kontribusi Balai POM di Tasikmalaya terhadap pencapaian pembangunan nasional.

Kami sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi dalam proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Kami berharap kepada seluruh pemangku kepentingan untuk senantiasa memperkuat komitmen, meningkatkan sinergi dan menjalin kolaborasi dalam kerangka Pengawas Obat dan Makanan untuk melindungi kesehatan masyarakat, demi tercapainya peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia.

Tasikmalaya, 05 Desember 2025
Kepala Balai POM di Tasikmalaya,



Iltizam Nasrullah, S.Si, Apt., M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	VI
Daftar Isi.....	VIII
Daftar Tabel.....	IX
Daftar Gambar.....	X
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Kondisi Umum	1
I.1.1. Capaian Kinerja Rencana Strategis BPOM tahun 2021-2024.....	5
I.1.2. Aspirasi <i>Stakeholders</i>	42
I.2 Potensi dan Permasalahan.....	45
I.2.1. Kekuatan (<i>Strenght</i>).....	46
I.2.2. Kelemahan (<i>Weakness</i>)	53
I.2.3. Peluang (<i>Opportunity</i>)	57
I.2.4. Ancaman (<i>Threat</i>)	64
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN	75
II.1. Visi.....	75
II.2. Misi.....	76
II.3. Tujuan.....	79
II.4. Sasaran Kegiatan.....	83
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	99
III.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM.....	99
III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Tasikmalaya.....	102
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	113
IV.1. Target Kinerja.....	113
IV.2. Kerangka Pendanaan.....	119
BAB V PENUTUP	121
LAMPIRAN	122
Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Penndanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya Tahun 2025-2029.....	122

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk.....	4
Tabel 2. Capaian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya.....	5
Tabel 3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan.....	50
Tabel 4. Data Siren Per Oktober 2025.....	55
Tabel 5. Matriks Ringkasan Analisis SWOT.....	74
Tabel 6. Indikator Tujuan BPOM 2025 – 2029.....	81
Tabel 7. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator..	89
Tabel 8. Indikasi Risiko Sasaran Strategis BPOM di Tasikmalaya.....	94
Tabel 9. Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi.....	104
Tabel 10. Matriks Kerangka Kinerja BPOM 2025-2029.....	113
Tabel 11. Kerangka Pendanaan Balai POM di Tasikmalaya 2025-2029 Berdasarkan Program.....	119
Tabel 12. Kerangka Pendanaan Balai POM di Tasikmalaya 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana.....	120

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Tasikmalaya.....	3
Gambar 2. Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya.....	3
Gambar 3. Nilai Kinerja Balai POM di Tasikmalaya.....	9
Gambar 4. Sasaran Strategis 1 : Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya.....	11
Gambar 5. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya 2020 – 2024.....	12
Gambar 6. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di Wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya 2020 – 2024.....	12
Gambar 7. Capaian Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2020 – 2024.....	13
Gambar 8. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2020 – 2024.....	13
Gambar 9. Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 2020 – 2024.....	14
Gambar 10. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya.....	15
Gambar 11. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya.....	16
Gambar 12. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya.....	18
Gambar 13. Capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2020 – 2024.....	19
Gambar 14. Capaian Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 2020 – 2024.....	19

Gambar 15. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2020 – 2024.....	20
Gambar 16. Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 2020 – 2024.....	20
Gambar 17. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 2020 – 2024.....	21
Gambar 18. Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetika yang baik 2020 – 2024	21
Gambar 19. Capaian Indeks Pelayanan Publik 2020 – 2024.....	22
Gambar 20. Capaian Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota 2020 – 2024.....	22
Gambar 21. Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya.....	24
Gambar 22. Capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2020 – 2024.....	25
Gambar 23. Capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 2020 – 2024.....	25
Gambar 24. Capaian Jumlah desa pangan aman 2020 – 2024.....	26
Gambar 25. Capaian jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 2020 – 2024.....	26
Gambar 26. Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya.....	27
Gambar 27. Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2020 – 2024.....	28
Gambar 28. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2020 – 2024.....	28
Gambar 29. Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya.....	29
Gambar 30. Sasaran Kegiatan 8 : Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Balai POM di Tasikmalaya yang Optimal.....	31

Gambar 31. Capaian persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tasikmalaya 2020 – 2024.....	32
Gambar 32. Capaian persentase dokumen ketata usahaan yang dilaporkan tepat waktu 2020 – 2024.....	32
Gambar 33. Capaian persentase dokumen perjanjian dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu 2020 – 2024.....	33
Gambar 34. Capaian nilai AKIP UPT 2020 – 2024.....	33
Gambar 35. Capaian indeks RB UPT 2020 – 2024.....	34
Gambar 36. Capaian nilai pengelolaan kearsipan 2020 – 2024.....	34
Gambar 37. Sasaran Kegiatan 9 : Terwujudnya SDM Balai POM di Tasikmalaya yang Berkinerja Optimal.....	35
Gambar 38. Sasaran Kegiatan 10 : Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan.....	37
Gambar 39. Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT 2020 – 2024.....	38
Gambar 40. Capaian persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP 2020 – 2024.....	38
Gambar 41. Sasaran Kegiatan 11 : Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tasikmalaya secara Akuntabel.....	39
Gambar 42. Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT 2020 – 2024.....	40
Gambar 43. Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Tasikmalaya 2020 – 2024.....	40
Gambar 44. Capaian nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa 2020 – 2024.....	41
Gambar 45. Capaian nilai pengelolaan barang milik negara 2020 – 2024.....	41
Gambar 46. Capaian realisasi penggunaan produk dalam negeri 2020 – 2024.....	41
Gambar 47. Jumlah pegawai Balai POM di Tasikmalaya Berdasarkan Tipe Pegawai	50
Gambar 48. Trend UMK yang mengajukan Sertifikasi.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

I.1.Kondisi Umum

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 merupakan periode awal dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2025 - 2045, fokus pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya merupakan unit pelaksana teknis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sebagai UPT BPOM, Balai POM Tasikmalaya melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Balai POM di Tasikmalaya berkontribusi terhadap kesehatan publik melalui pengawasan produk obat dan makanan khususnya di wilayah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Pangandaran memiliki akses terhadap produk yang aman dan berkualitas. Sehingga dapat berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pengurangan risiko kesehatan yang diakibatkan oleh produk yang tidak memenuhi standar.

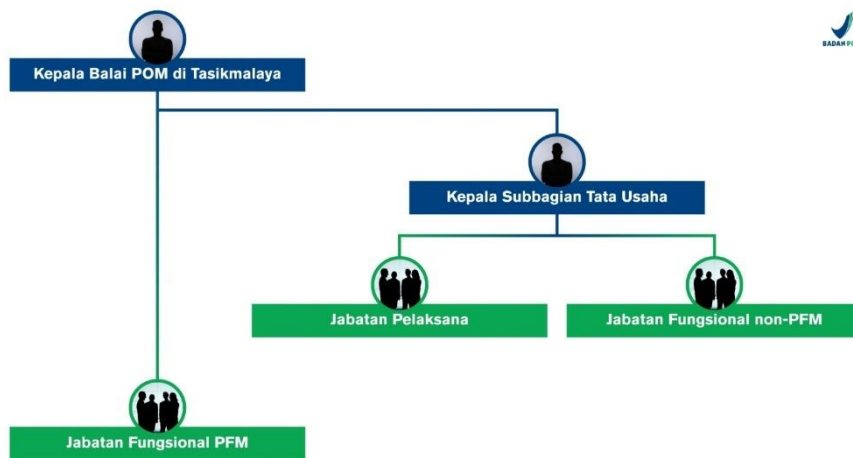
Berdasarkan Peraturan Badan POM nomor 19 tahun 2023 Pasal 4, dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3, Balai POM di Tasikmalaya sebagai UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas produksi Obat dan Makanan;

3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana/fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan/atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Untuk organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis BPOM diatur sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut UPT BPOM adalah organisasi yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Sesuai peraturan BPOM tersebut di Propinsi Jawa Barat selain Balai POM di Tasikmalaya terdapat 2 UPT lain yaitu Balai Besar POM di Bandung dan Balai POM di Bogor.

Susunan organisasi Balai Besar POM terdiri atas: a. Kepala Balai; b. Kepala Bagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 1. Struktur Organisasi Balai POM di Tasikmalaya

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia nomor 19 tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya terdiri dari 5 kabupaten/ kota di wilayah Provinsi Jawa Barat yaitu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran.



Catchment Area Balai POM di Tasikmalaya

Gambar 2. Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya

Luas wilayah kerja pengawasan Balai POM di Tasikmalaya secara keseluruhan adalah 6142,3 km² atau 17,36% dari luas wilayah provinsi Jawa Barat (35.378 km²). Adapun jumlah luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota seperti yang terlihat di Tabel 1.

Tabel 1. Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)
1	Kota Tasikmalaya	183,8	750.730
2	Kabupaten Tasikmalaya	2713	1.920.920
3	Kabupaten Ciamis	1434	1.259.230
4	Kota Banjar	132	209.790
5	Kabupaten Pangandaran	1680	434.100
Total		6142,3	4.574.770

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2024

Jumlah penduduk di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya sebanyak 4.574.770 Jiwa atau sebesar 9.08% dari jumlah total penduduk di provinsi Jawa Barat. Adapun jumlah luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota seperti yang terlihat seluruh wilayah kerja dapat dijangkau melalui transportasi darat (100%). Waktu tempuh yang diperlukan untuk mencapai wilayah kerja berada di antara 0-6 jam.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Tasikmalaya untuk periode 2025-2029 menjadi langkah penting sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra Balai POM di Tasikmalaya disusun tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk menyiapkan apa yang terjadi di masa mendatang dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan Balai POM di Tasikmalaya untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, terutama di tengah pesatnya inovasi dan perkembangan sektor obat dan makanan.

Renstra Balai POM di Tasikmalaya 2025-2029 merupakan langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat dengan menjamin obat dan makanan yang aman dan bermutu. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Balai POM di Tasikmalaya siap untuk menghadapi tantangan masa depan dengan keyakinan dan kompetensi, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

I.1.1.1. Capaian Kinerja Rencana Strategis BPOM tahun 2021 - 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan. Pengukuran kinerja BPOM di Tasikmalaya mengacu pada ketercapaian kegiatan yang merupakan penjabaran dari visi-misi BPOM di Tasikmalaya tahun 2020-2024. Sesuai dengan sasaran dan indikator agenda pembangunan, indikator RPJMN 2020-2024 Balai POM di Tasikmalaya. Capaian kinerja Balai POM di Tasikmalaya tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Capaian Kinerja Balai POM di Tasikmalaya 2021-2024

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Tahun														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	Presentase Obat yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	80.80	98.36	121.73	97.00	81.73	84.26	97.50	88.43	90.70	98.00	98.44	100.45	98.50	96.27	97.73
2		Persentase Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	78	85.71	109.88	85.50	92.78	108.51	87.00	94.21	108.29	88.50	93.44	105.58	94.00	92.97	98.90
3		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	90	96.30	107	96	75.26	78.40	97.00	90.72	93.53	97.50	95.88	98.34	96.08	92.86	96.65
4		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	50	62.5	125	62.50	66.67	106.67	65.00	74.36	114.4	68.00	87.50	128.68	86.70	90.63	104.53

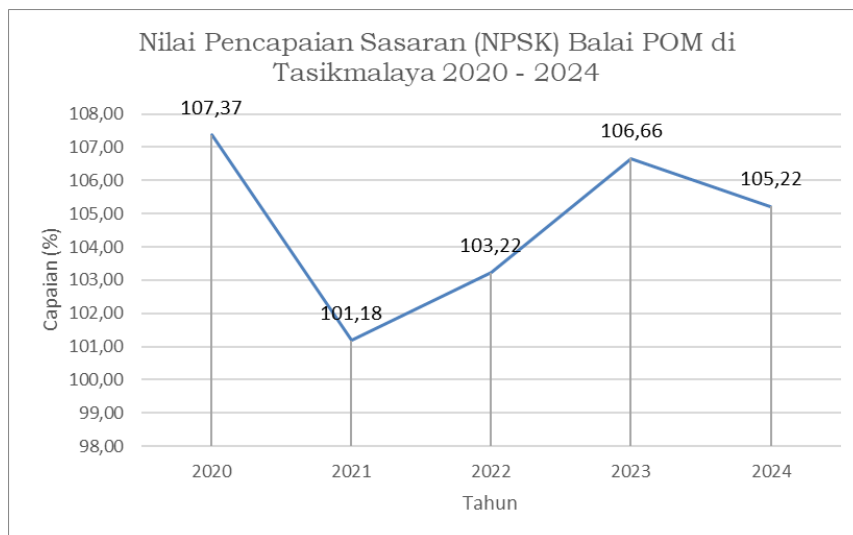
No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Tahun														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
5		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat										74.00	93.33	126.12	90.00	100	111.11
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya													74.47	82.23	110.42
7		Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan													94.6	98.04	103.64
8		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan													87.54	83.18	95.02
9		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM													90.75	92.79	102.25
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	98.64	113.38	90.00	99.26	110.29	92.00	100	108.70	93.00	100	107.53	95.00	100	105.26
11		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	56.9	33.76	59.33	50.00	81.03	162.06	55.00	67.18	122.15	60.00	69.33	115.55	65.00	81.63	125.58
12		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85	60	70.59	88.00	95.00	107.95	90.00	92.11	102.34	93.00	100	107.53	95.00	100	105.26
13		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	50	61.29	122.58	61.00	45.45	74.51	66.00	57.14	86.58	70.00	80.95	115.64	75.00	70.45	93.94

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Tahun														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
14		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	60	84.41	140.68	84.00	81.98	97.60	86.00	63.28	73.58	88.00	86.44	98.23	88.00	88.15	100.17
15		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetika yang baik.							77.00	100	129.87	79.00	100	126.58	100	100	100
16		Indeks Pelayanan Publik													4.15	4.43	106.75
17		Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota													95.00	99.80	105.05
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	87.43	89.88	102.80	89.50	91.61	102.36	91.30	91.49	100.21	93.10	94.04	101.01	94.90	95.60	100.74
19		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman													6.00	6.00	100
20		Jumlah desa pangan aman													1.00	1.00	100
21		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya													1.00	1.00	100
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	50.00	50.00	100	50.00	50.00	100	50.00	50.00	100	50.00	50.00	100
23		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50	50	100	50.00	50.00	100	50.00	50.00	100	50.00	50.00	100	50.00	50.00	100

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Tahun														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
24	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	Presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74	100	135.14	85.00	100	117.65	87.00	100	114.94	88.00	92.50	105.11	90.00	83.13	92.37
25	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai POM di Tasikmalaya yang optimal	Presentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tasikmalaya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.48	100.48			
26		Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu.	100	97.33	97.33	100	100	100									
27		Presentase dokumen Perjanjian Kinerja dan capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang disusun tepat waktu	100	100	100	100	100	100									
28		Nilai AKIP UPT							80.60	76.39	94.78	82.20	75.65	92.03	80.40	78.17	97.23
29		Indeks RB UPT													75.00	75.70	100.93
30		Nilai Pengelolaan Kearsipan													90.74	91.32	100.94
31	Menguatnya Laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT							2.25	2.50	111.11	2.50	2.50	100	3.00	3.00	100
32		Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP													40.00	40.38	100.95
33	Terwujudnya SDM Balai POM di Tasikmalaya yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tasikmalaya	75	75.94	101.25	77.00	82.19	106.74	78.00	82.32	105.54	79.00	87.83	111.18	89.63	85.42	95.30
34	Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tasikmalaya	Nilai Kinerja Anggaran UPT				90.00	89.24	99.16	90.60	89.88	99.21	90.60	90.75	100.17	93.00	95.11	102.27

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indeks Kinerja Sasaran Program/ Kegiatan	Tahun														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
35	secara Akuntabel	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Tasikmalaya	92	100	108.70	92.00	100	108.70									
36		Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa													70.00	95.00	135.71
37		Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara													91.00	94.15	103.46
39		Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri													60.00	95.42	159.03

Selama periode RPJMN 2021–2024, kinerja Balai POM di Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2021 hingga 2023. Hal ini mencerminkan upaya perbaikan kinerja yang dilakukan secara berkelanjutan. Namun, pada tahun 2024 terjadi penurunan nilai kinerja menjadi 101,53. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan status unit kerja dari Loka POM menjadi Balai POM, yang berdampak pada bertambahnya jumlah indikator kinerja dari semula 20 indikator menjadi 35 indikator.



Gambar 3. Nilai Kinerja Balai POM di Tasikmalaya

Pengukuran kinerja BPOM mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan

mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam penyusunan Sasaran Kegiatan, BPOM menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*.

Balai POM Tasikmalaya memiliki 11 Sasaran Kegiatan (SS) dan 39 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK). Penjelasan lebih rinci terkait capaian kinerja pada setiap Sasaran Kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran Kegiatan (SK1)

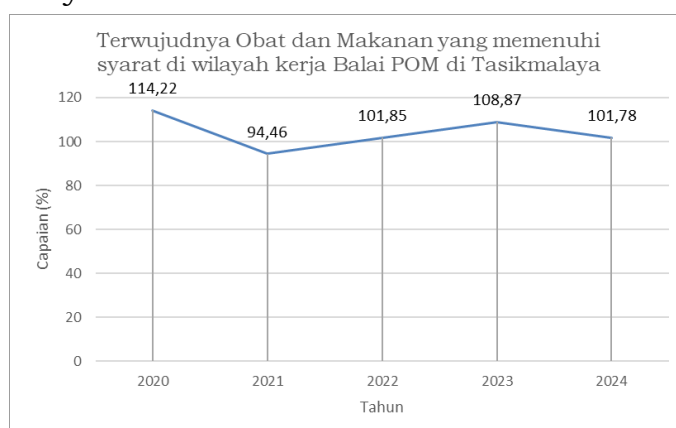
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing – masing wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Tasikmalaya tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dan sistematis dari tahap awal produksi hingga produk siap digunakan atau dikonsumsi. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk sub standar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen / masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Tasikmalaya merupakan suatu proses yang komprehensif yang diantaranya terdiri dari pertama, pengawasan setelah beredar (*post-market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan sampling produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Ke-dua pengujian laboratorium. Produk yang disampling berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan

Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat. Ke-tiga, penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justicia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah-kaidah dan fungsi-fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre-market* dan *post-market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Pada Indikator kinerja Persentase Makanan yang memenuhi syarat (*Random sampling*). Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan, Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat.



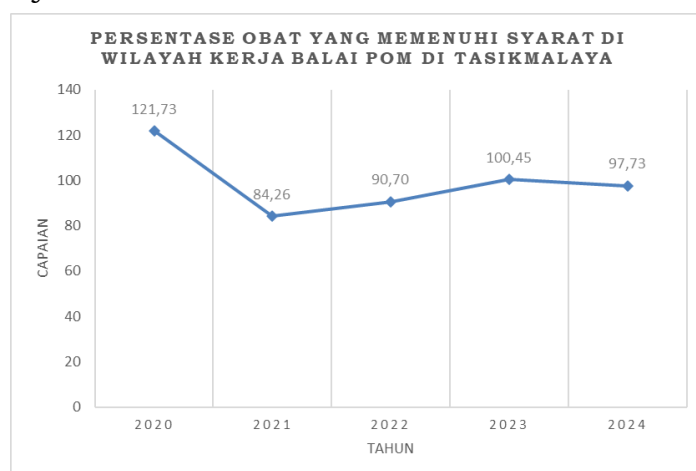
Gambar 4. Sasaran Kegiatan I : Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya

Pada grafik tersebut menggambarkan progres BPOM di Tasikmalaya dalam mencapai Sasaran Kegiatan I. BPOM di Tasikmalaya mengalami

penurunan capaian pada tahun 2021 dari semula 114.22 turun menjadi 94.46 di tahun 2020. Capaian di tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 101.85 dan di tahun 2023 menjadi 108.87. Namun, di periode akhir mengalami penurunan menjadi 101.78.

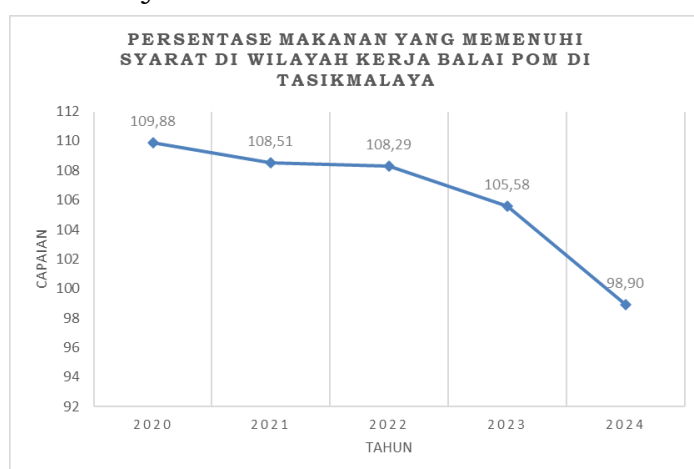
Pada Sasaran Kegiatan I Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya, terdapat beberapa indikator yaitu:

- (1) Presentase Obat yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya.



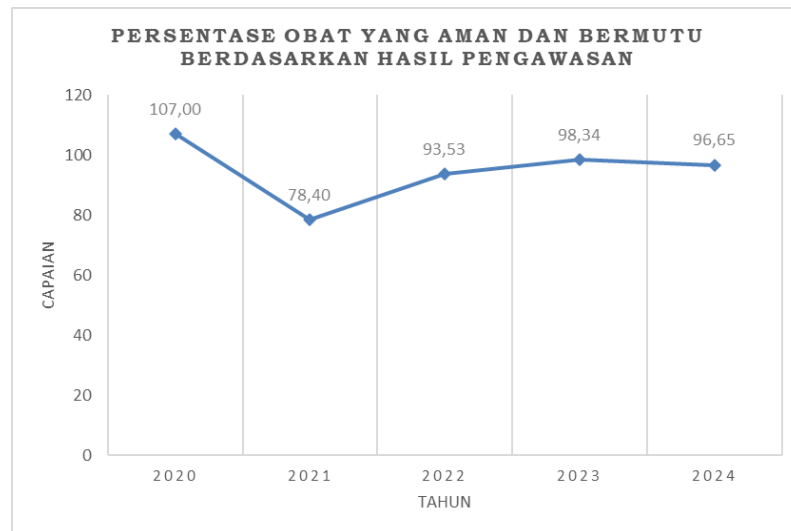
Gambar 5. Capaian persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya 2020 - 2024

- (2) Persentase Makanan yang memenuhi Syarat di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya.



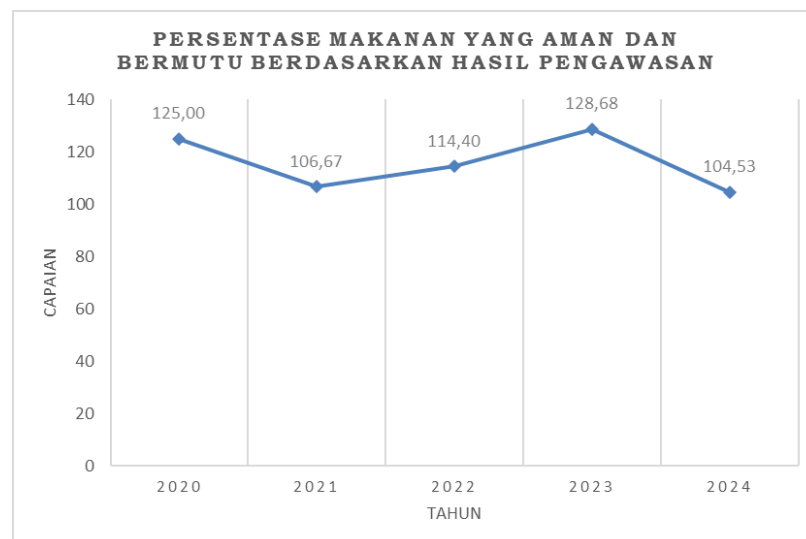
Gambar 6. Capaian persentase makanan yang memenuhi syarat di Wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya 2020 – 2024

- (3) Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.



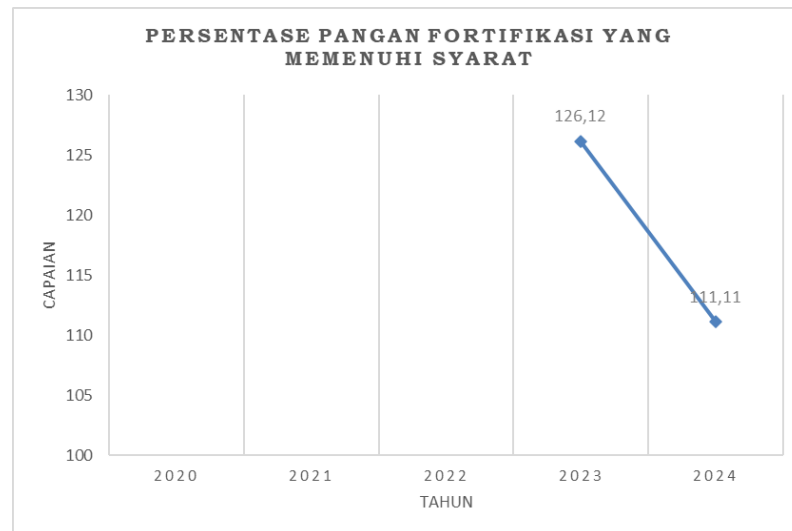
Gambar 7. Capaian Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2020 – 2024

- (4) Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan.



Gambar 8. Capaian persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 2020 – 2024

(5) Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat.



Gambar 9. Capaian persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 2020 - 2024

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pencapaian oleh Balai POM di Tasikmalaya yaitu:

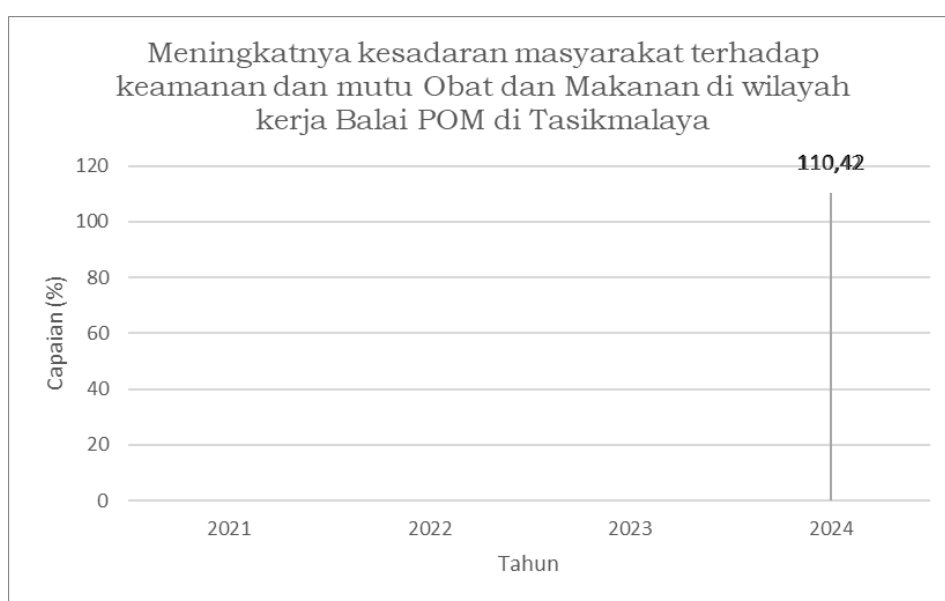
- Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang berkualitas melalui kampanye Cek KLIK pada kegiatan KIE untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
- Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan;
- Koordinasi dengan pemerintah daerah untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan obat dan makanan melalui pendampingan penggunaan anggaran melalui DAK Nonfisik Subbidang Pengawasan Obat dan Makanan kepada Pemerintah Daerah.

2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Dalam sub sistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang

memenuhi syarat harus diciptakan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Oleh karena itu perlu ditingkatkan pengetahuan masyarakat terkait dengan obat dan makanan. Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya. Sasaran ini merupakan sasaran baru di tahun 2024



Gambar 10. Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya

Pada Sasaran Kegiatan 2, Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Tasikmalaya, terdapat beberapa indikator yaitu (1) Indeks kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya. Pada sasaran ini tidak dapat dilihat tren pencapaiannya dikarenakan sasaran merupakan sasaran baru di tahun 2024.

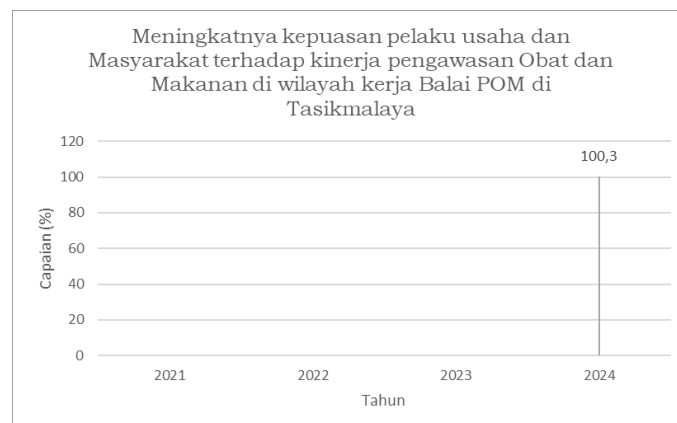
Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan sinergi dan penguatan kemitraan dengan lintas sektor untuk berkolaborasi dan bekerjasama mengedukasi masyarakat dan menyebarluaskan informasi keamanan Obat dan Makanan;
- b. meningkatkan intensitas dan strategi pelaksanaan program KIE kepada masyarakat.

3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Balai POM di Tasikmalaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Tasikmalaya mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, disisi lain layanan publik Balai POM di Tasikmalaya bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan perekonomian nasional. Indikator kinerja Sasaran Kegiatan mencakup Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan, Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan, Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM.



Gambar 11. Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Sasaran ini merupakan sasaran baru di tahun 2024 sehingga tidak dapat dibandingkan tren pencapaiannya. Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS3 yaitu:

- a. Menindaklanjuti saran/masukan responden yang relevan bagi peningkatan kualitas bimbingan dan pembinaan BPOM;
- b. Meningkatkan kegiatan publik relation dan publikasi berbagai aktivitas pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM melalui berbagai media;
- c. Meningkatkan engagement dengan melakukan interaksi aktif dengan pengikut pada media sosial yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja;
- d. Melakukan sosialisasi tentang layanan, menyederhanakan persyaratan, mengoptimalkan berbagai media untuk konsultasi, dan memberikan pendampingan kepada pelanggan;
- e. Setiap UPP di lingkungan BPOM agar menyusun rencana aksi tindak lanjut per jenis layanan atas 3 (tiga) unsur dengan nilai terendah serta memperhatikan saran/masukan responden pada saat pelaksanaan SKM.

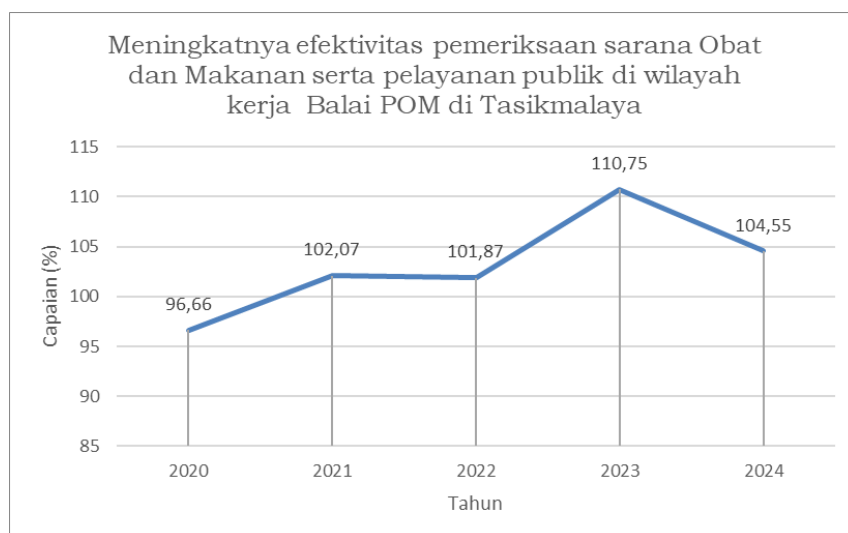
4. Sasaran Kegiatan (SK4)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Tasikmalaya akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Tasikmalaya mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor.

Balai POM di Tasikmalaya perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Cara mengukur capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan, Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan, Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu, dengan target, Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan, Indeks pelayanan publik, Persentase UMKM yang memenuhi standar, Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota .

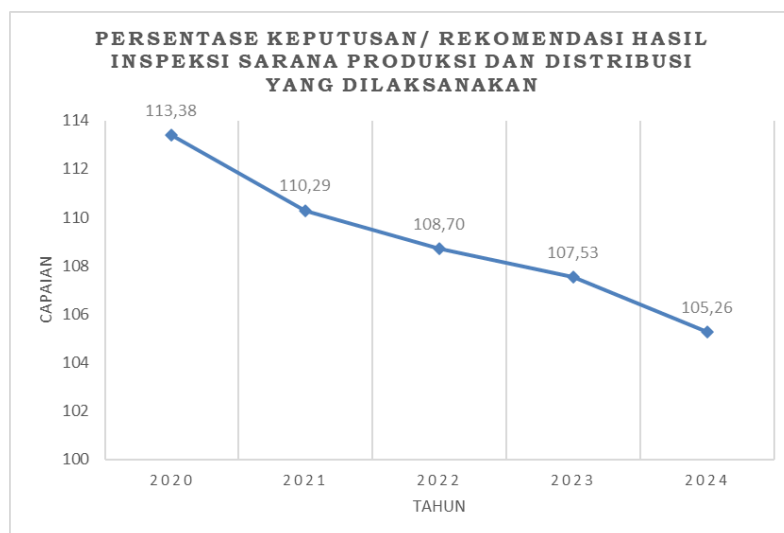


Gambar 12. Sasaran Kegiatan 4 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Dari grafik tersebut BPOM di Tasikmalaya mengalami peningkatan capaian dari semula 96.66 di tahun 2020 menjadi 102.07 di tahun 2021. Capaian di tahun 2022 101.87 dan mengalami peningkatan signifikan di tahun 2023 menjadi 110.75. Sementara itu, di akhir periode capaian sasaran kegiatan ini mengalami penurunan menjadi 104.55 di tahun 2024.

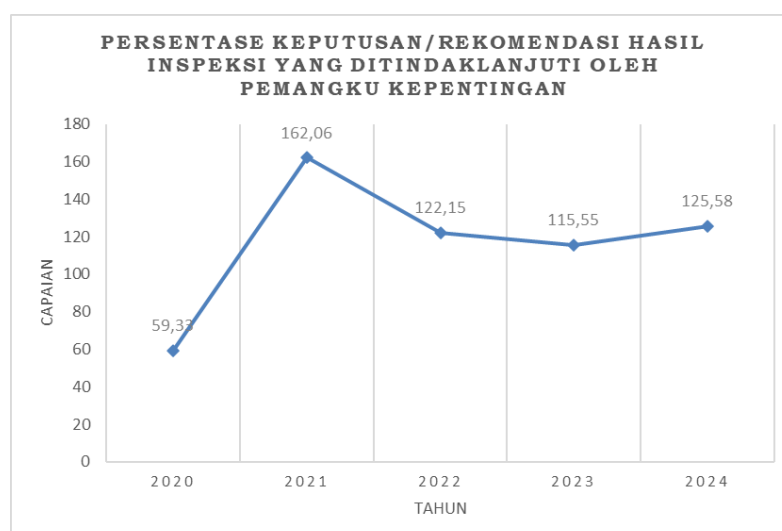
Pada Sasaran Kegiatan 4, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik, terdapat beberapa indikator yaitu:

- (1) Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan.



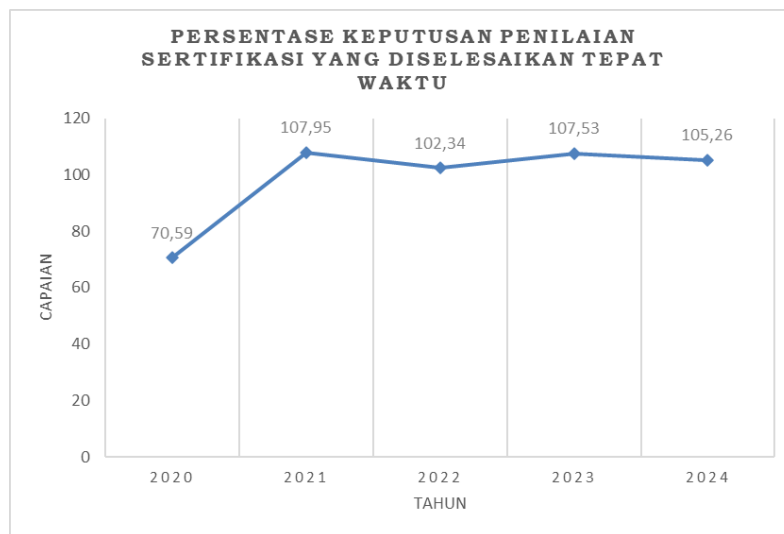
Gambar 13. Capaian persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan 2020 - 2024

- (2) Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan.



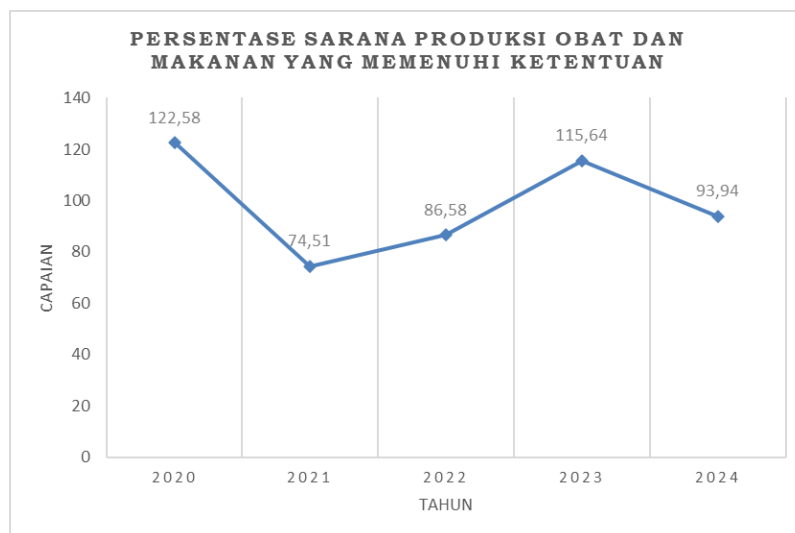
Gambar 14. Capaian ersentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan 2020 - 2024

- (3) Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu.



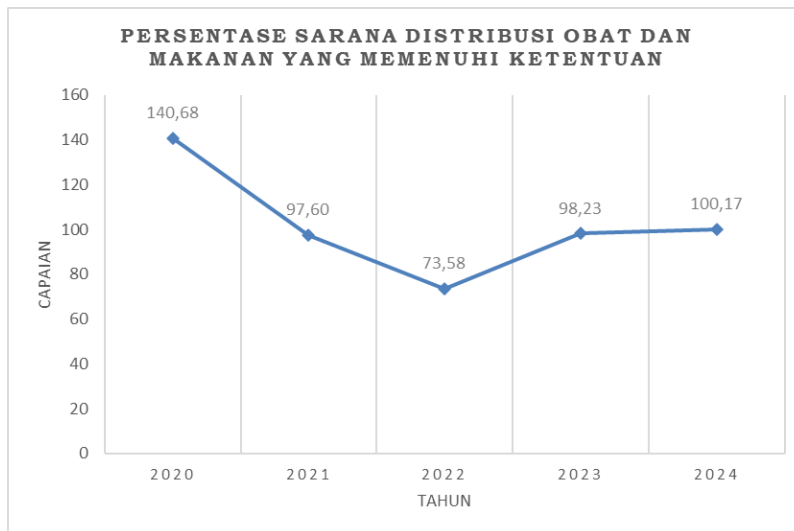
Gambar 15. Capaian persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu 2020 – 2024

- (4) Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.



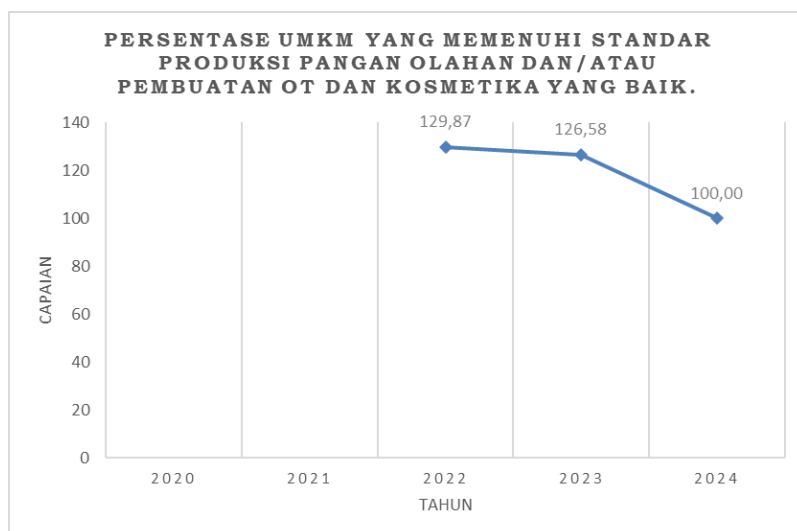
Gambar 16. Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 2020 – 2024

- (5) Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan.



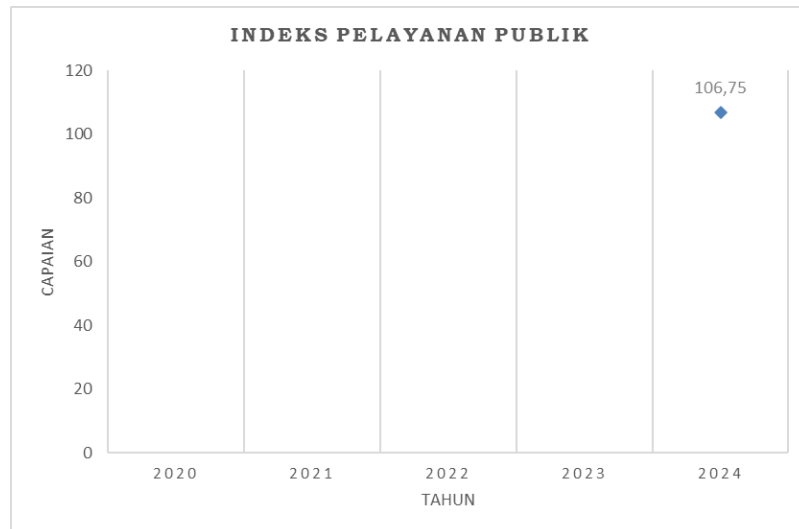
Gambar 17. Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan 2020 - 2024

- (6) Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetika yang baik.



Gambar 18. Capaian persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetika yang baik 2020 – 2024

(7) Indeks Pelayanan Publik



Gambar 19. Capaian Indeks Pelayanan Publik 2020 - 2024

(8) Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota.



Gambar 20. Capaian Persentase Keterlibatan UPT dalam Program Sediaan Farmasi Makanan Minuman Serta Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan di Provinsi/Kabupaten/Kota 2020 – 2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS4 yaitu:

- a. Koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pemeriksaan sarana dan produk, serta pengawasan peredaran produk daring;
- b. Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan;
- c. Melakukan simplifikasi dan percepatan pelayanan publik di bidang pengawasan Obat;
- d. Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman;
- e. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor terkait tindak lanjut hasil pengawasan;
- f. Menetapkan prioritas bersama lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan;
- g. Mensosialisasikan kembali Inpres 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan kepada lintas sektor;
- h. Perlu dilakukan review terhadap standar pelayanan minimal setahun sekali serta mengacu pada Peraturan BPOM Nomor 28 tahun 2022;
- i. Menyusun inovasi pelayanan publik dapat terus belajar untuk menciptakan inovasi baik.

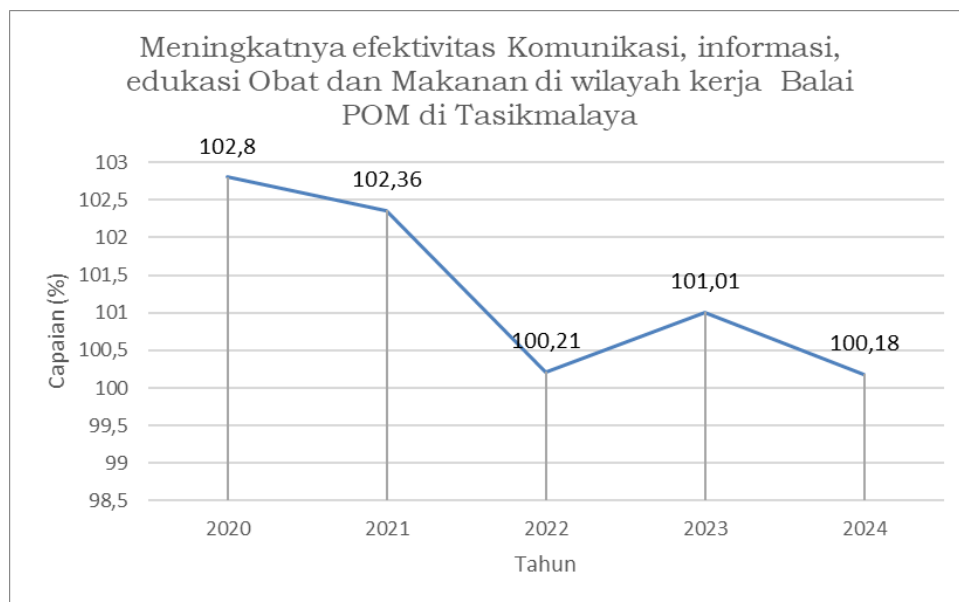
5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Masyarakat sebagai konsumen obat dan makanan memegang peranan penting dalam sistem pengawasan obat dan makanan. Sebagai penggerak ekonomi dari sisi permintaan, masyarakat perlu mendapatkan informasi terkini mengenai obat dan makanan secara akurat. Mengingat adanya potensi beredarnya produk di pasaran yang tidak memenuhi syarat, edukasi terhadap masyarakat menjadi langkah preventif yang penting. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat memilih dan

menggunakan produk obat dan makanan yang aman, berkhasiat atau bermanfaat, serta bermutu.

Balai POM di Tasikmalaya melakukan kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan. Sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja utama (IKU): Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman, Jumlah desa pangan aman, Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.

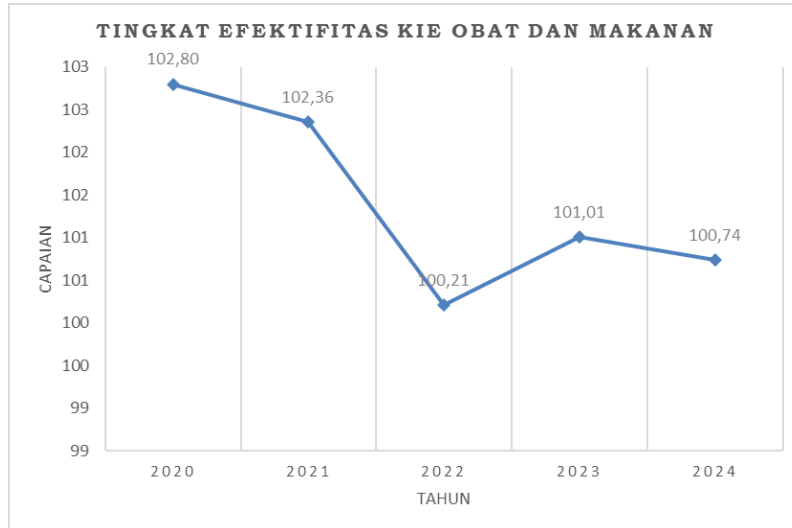


Gambar 21. Sasaran Kegiatan 5 : Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Dari grafik tersebut BPOM di Tasikmalaya mengalami penurunan yang semula mencapai nilai 102.8 di tahun 2020 menjadi 102.36 di tahun 2021. Terdapat penurunan yang signifikan pada tahun 2022 menjadi 100.21, sempat mengalami peningkatan menjadi 101.01 di tahun 2023 namun di akhir periode kembali mengalami penurunan menjadi 100.18 di tahun 2024.

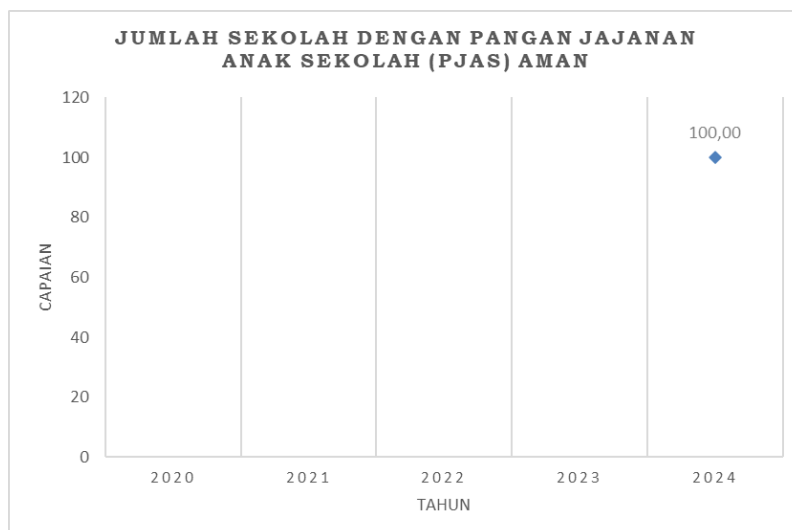
Pada Sasaran Kegiatan 4, Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya, terdapat beberapa indikator yaitu

(1) Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan.



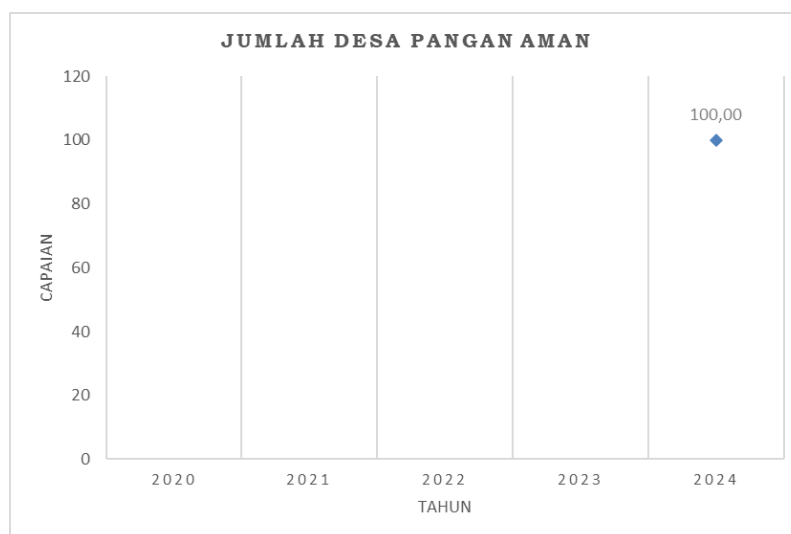
Gambar 22. Capaian Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan 2020 - 2024

(2) Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman.



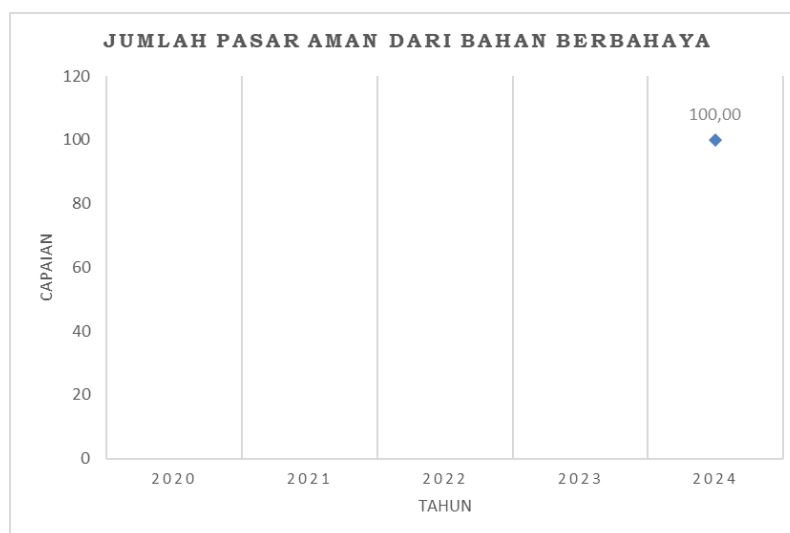
Gambar 23. Capaian Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman 2020 – 2024

(3) Jumlah desa pangan aman.



Gambar 24. Capaian Jumlah desa pangan aman 2020 - 2024

(4) Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya.



Gambar 25. Capaian jumlah pasar aman dari bahan berbahaya 2020 - 2024

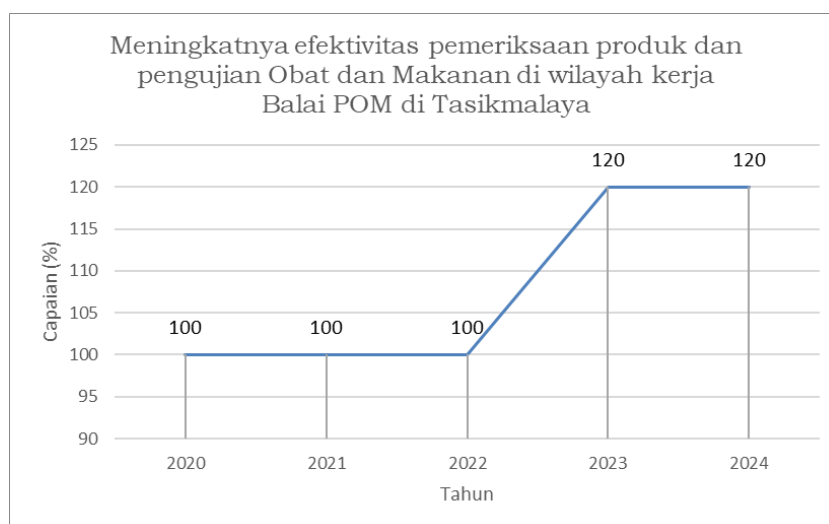
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan SS5:

- a. Peningkatan inovasi ragam kegiatan KIE baik secara kuantitas dan kualitas untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan sekaligus membangun kesadaran masyarakat;
- b. Pendekatan secara komprehensif dengan pemerintah daerah dalam lokus pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

6. Sasaran Kegiatan (SK6)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya yang optimal

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) diantaranya mencakup pengujian produk. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/ memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Tasikmalaya mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, dengan indikator: Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dan Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

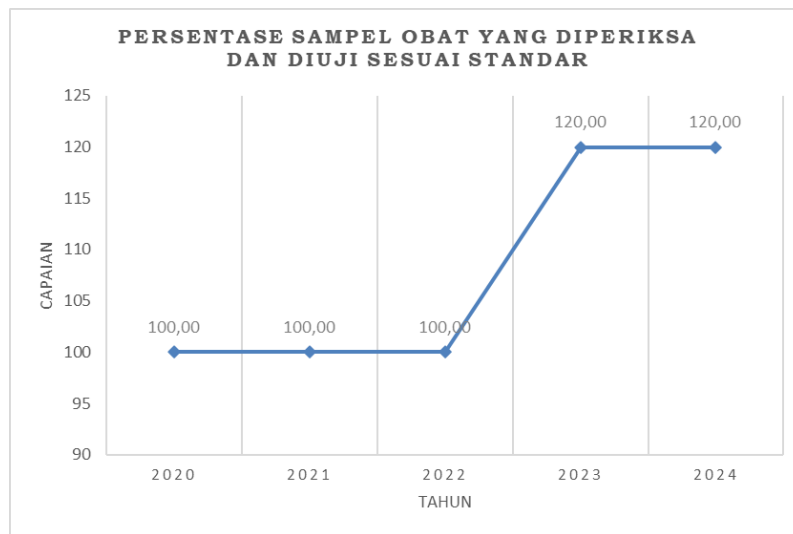


Gambar 26. Sasaran Kegiatan 6 : Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Dari grafik tersebut pencapaian BPOM di Tasikmalaya terhadap sasaran ini konsisten di angka 100 dari 2020-2022. Capaian di tahun 2023 – 2024 mengalami peningkatan menjadi 120 sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.09.03.2.01.25.42 tanggal 15 Januari 2025 indikator pada sasaran kegiatan ini dapat dikonversi nilainya menjadi 120.

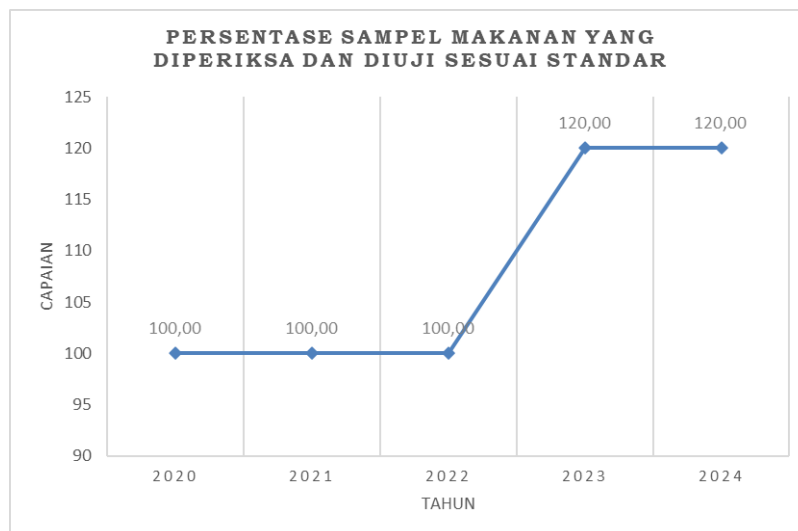
Pada Sasaran Kegiatan 6, Meningkatnya efektivitas Komunikasi, Informasi dan Edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya, terdapat beberapa indikator yaitu:

(1) Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar.



Gambar 27. Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2020 - 2024

(2) Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar.



Gambar 28. Capaian persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar 2020 – 2024

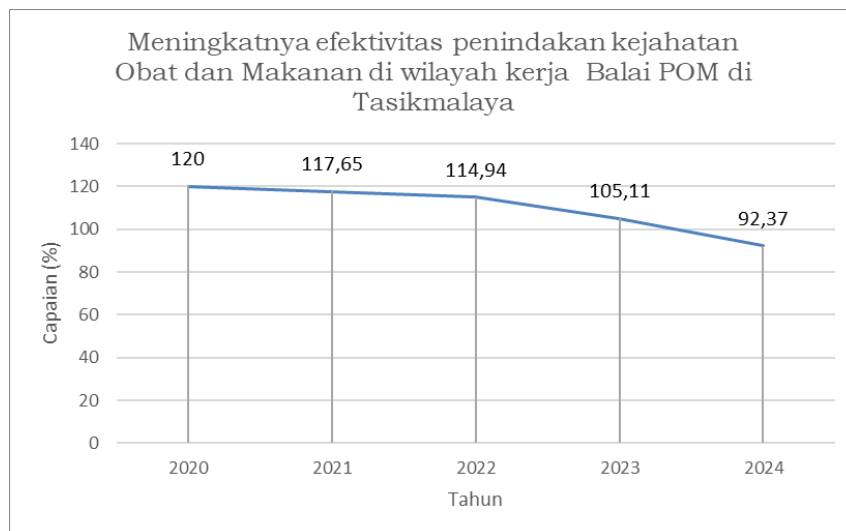
7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi

ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi maupun sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Tasikmalaya menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Tasikmalaya melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) nya yaitu: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan.



Gambar 29. Sasaran Kegiatan 7 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Indikator pada sasaran kegiatan 7 selama periode 2020 – 2024 trendnya mengalami penurunan tahun 2020 mendapatkan capaian 120, tahun 2021 sebesar 117.65, tahun 2022 sebesar 114.94, tahun 2023 sebesar 105.11 dan di akhir periode sebesar 92.37 di tahun 2024.

Pada Sasaran Kegiatan 7, Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya, indikator yaitu presentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Dari grafik tersebut BPOM di Tasikmalaya mengalami penurunan dari tahun 2021 sampai 2024 secara konsisten..

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS7 yaitu:

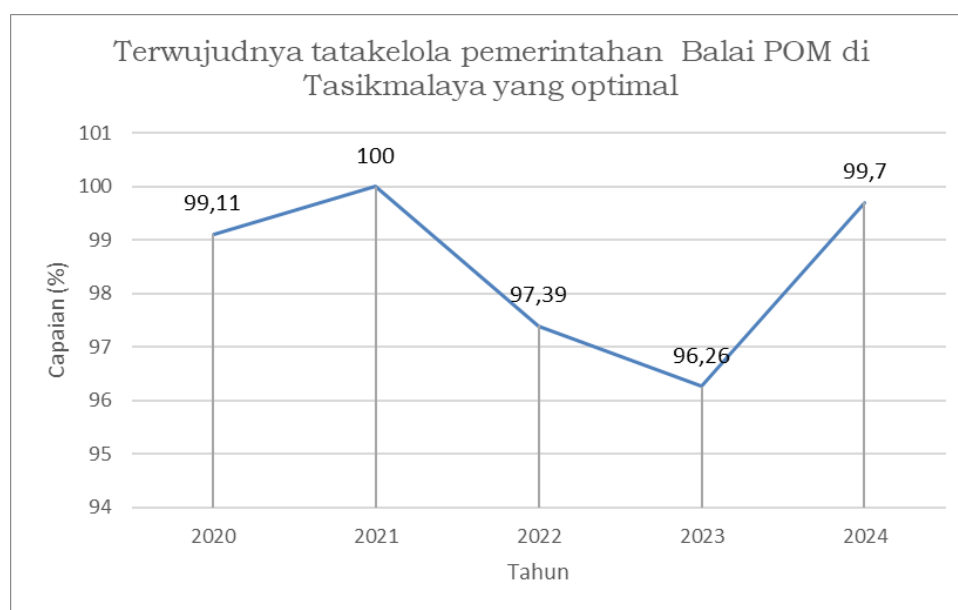
- a. Advokasi Kegiatan Penyidikan Obat dan Makanan, berupa konsultasi dengan penasehat hukum/ jaksa dalam rangka penyelesaian perkara;
- b. Perkuatan koordinasi lintas sektor CJS dengan berbagai kegiatan, seperti FGD Perkuatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan (koordinasi lintas sektor);
- c. Penambahan jumlah PPNS BPOM dengan mengadakan pelatihan pembentukan PPNS.

8. Sasaran Kegiatan (SK8)

Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Tasikmalaya yang optimal

Sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Tasikmalaya berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik Balai POM di Tasikmalaya akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, 26 efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Tasikmalaya, diperlukan penguatan

kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Tasikmalaya. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka Indikator Kinerja Utama (IKU) nya adalah: Indeks RB UPT, Nilai AKIP.

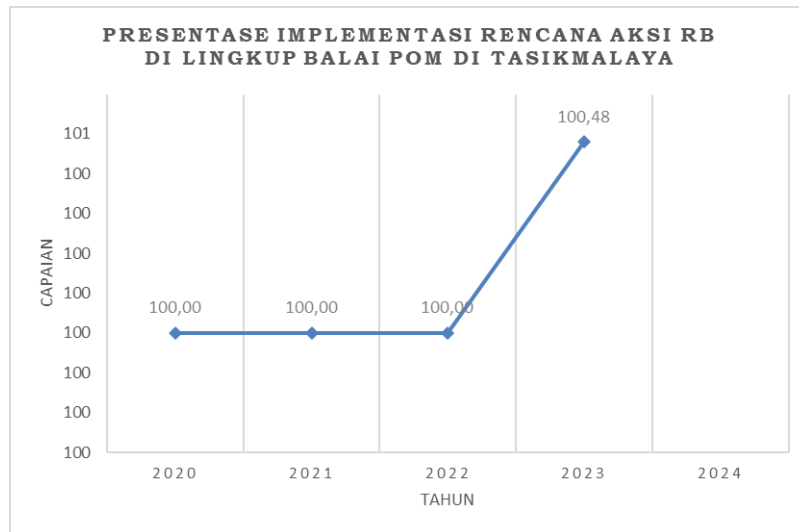


Gambar 30. Sasaran Kegiatan 8 : Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Balai POM di Tasikmalaya yang Optimal

Pada tahun 2021, capaian berada pada angka 99.11 kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 100. Terdapat sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 97.39, dan kembali pada tahun 2023 menjadi 96.26. Namun pada tahun 2024 mengalami kenaikan nilai capaian menjadi 99.60. Balai POM di Tasikmalaya melakukan perbaikan sehingga menunjukkan tren positif nilai capaian hampir kembali sama seperti pada tahun 2021

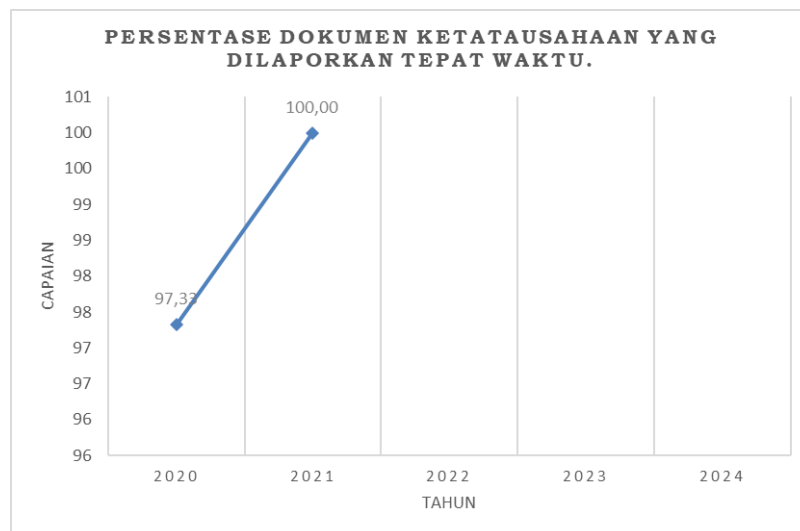
Pada Sasaran Kegiatan 8, Terwujud Tatakelola Pemerintah Balai POM di Tasikmalaya yang Optimal, terdapat beberapa indikator yaitu :

- (1) Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tasikmalaya.



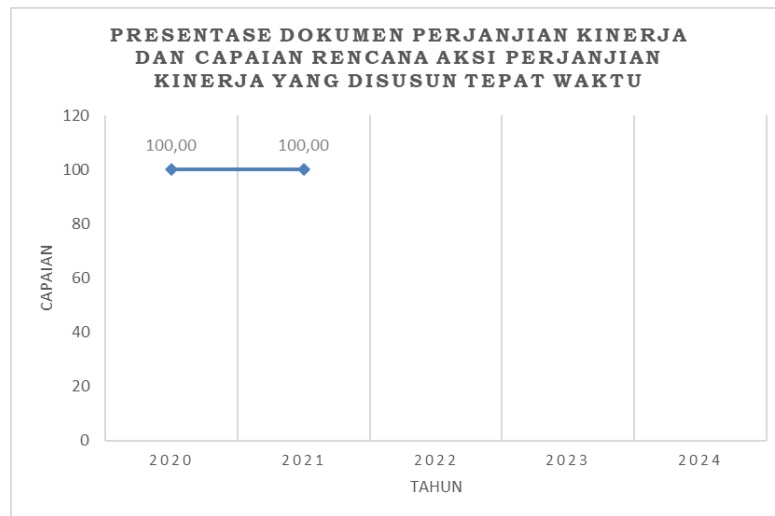
Gambar 31. Capaian persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Balai POM di Tasikmalaya 2020 – 2024

- (2) Persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu.



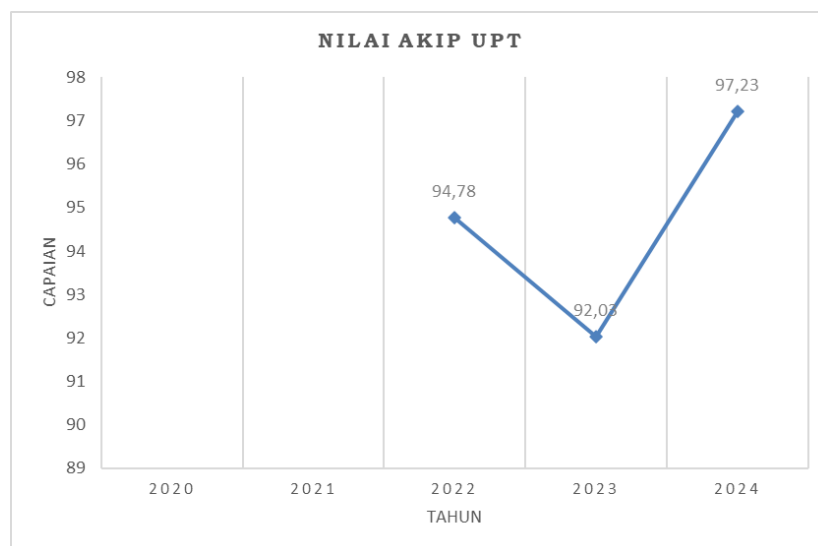
Gambar 32. Capaian persentase dokumen ketatausahaan yang dilaporkan tepat waktu 2020 – 2024

- (3) Persentase dokumen perjanjian dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu.



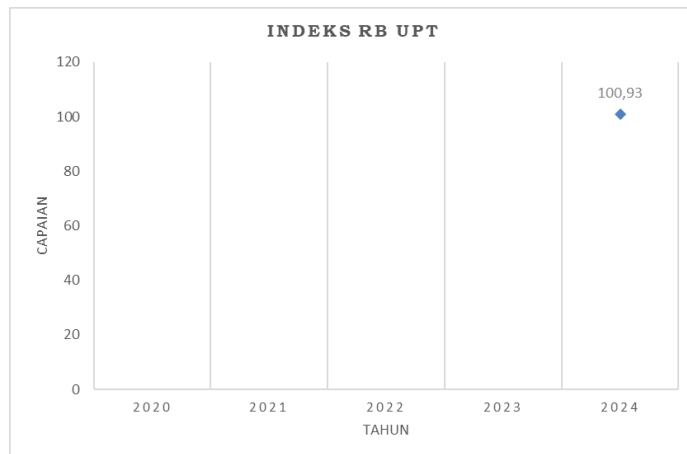
Gambar 33. Capaian persentase dokumen perjanjian dan capaian rencana aksi perjanjian kinerja yang disusun tepat waktu 2020 – 2024

- (4) Nilai AKIP UPT



Gambar 34. Capaian nilai AKIP UPT 2020 – 2024

(5) Indeks RB UPT



Gambar 35. Capaian indeks RB UPT 2020 - 2024

(6) Nilai Pengelolaan Kearsipan.



Gambar 36. Capaian nilai pengelolaan kearsipan 2020 - 2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS8 yaitu:

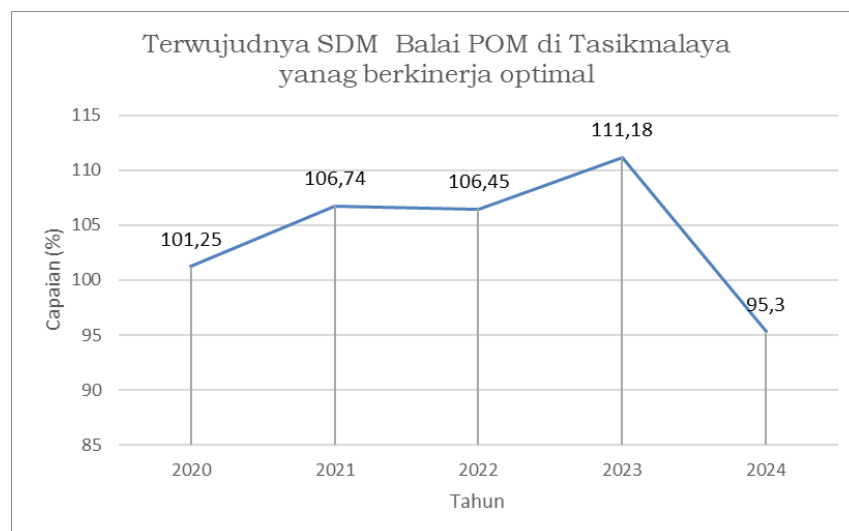
- Memastikan Rencana Aksi RB General relevan dan cukup untuk mencapai target Sasaran Kegiatan Utama;
- Menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP sebagaimana tercantum pada hasil evaluasi;
- Monev Rencana Aksi pengelolaan pengaduan dan melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai pengelolaan pengaduan kepada masyarakat;
- Memastikan rencana aksi RB Tematik telah logis untuk mendukung ketercapaian indikator keberhasilan RB Tematik instansi Pemerintah;

- e. Melakukan reviu dan perbaikan kerangka logis kinerja dengan menentukan kondisi/outcome atau kinerja yang akan diwujudkan dan CSF dari outcome tersebut, mulai dari kinerja strategis sampai kinerja operasional;

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

Terwujudnya SDM Balai POM di Tasikmalaya yang berkinerja optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Tasikmalaya.



Gambar 37. Sasaran Kegiatan 9 : Terwujudnya SDM Balai POM di Tasikmalaya yang Berkinerja Optimal

Pada Sasaran Kegiatan 9, Terwujudnya SDM Balai POM di Tasikmalaya yang Berkinerja Optimal dengan indikator Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Tasikmalaya. Dari grafik tersebut BPOM di Tasikmalaya

Grafik di atas menunjukkan capaian Sasaran Kegiatan kinerja sumber daya manusia (SDM) Balai POM di Tasikmalaya selama empat tahun terakhir, dari tahun 2021 hingga 2024. Sasaran Kegiatan ini menggambarkan sejauh mana kinerja SDM telah mencapai tingkat optimal sesuai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2020, capaian kinerja SDM Balai POM di Tasikmalaya sebesar 101.25, tahun 2022 sebesar 106.74, yang kemudian mengalami sedikit penurunan menjadi 106.45 pada tahun 2022. Meskipun terjadi penurunan, nilai tersebut masih menunjukkan performa yang cukup stabil. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2023, di mana capaian mencapai angka tertinggi selama periode ini, yaitu 111.18. Diakhir periode terjadi perubahan cara perhitungan indikator ini sehingga capaian di tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 95.3.

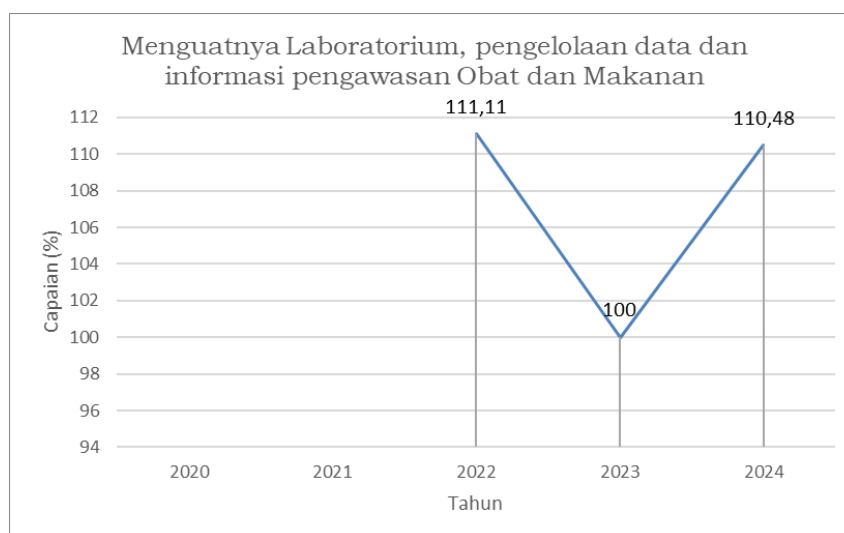
Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS9 yaitu:

- a. Mengembangkan sistem untuk memonitoring capaian pegawai di unit kerja;
- b. Menyusun panduan jenis diklat untuk mengatasi permasalahan dalam salah kategorisasi diklat yang diinput pegawai;
- c. Melakukan pemetaan kompetensi ASN secara berkala, sesuai Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
- d. Melaksanakan kegiatan Feedback Penilaian Kompetensi secara berkala per triwulan.

10. Sasaran Kegiatan (SK10)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah menguatnya laboratorium pengujian Balai POM di Tasikmalaya dalam pemenuhan terhadap standar serta sistem operasional, teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan pengawasan obat dan makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran kegiatan ini, indikator kinerja yang digunakan adalah: Indeks Pengelolaan data dan informasi Balai POM di Tasikmalaya yang optimal,



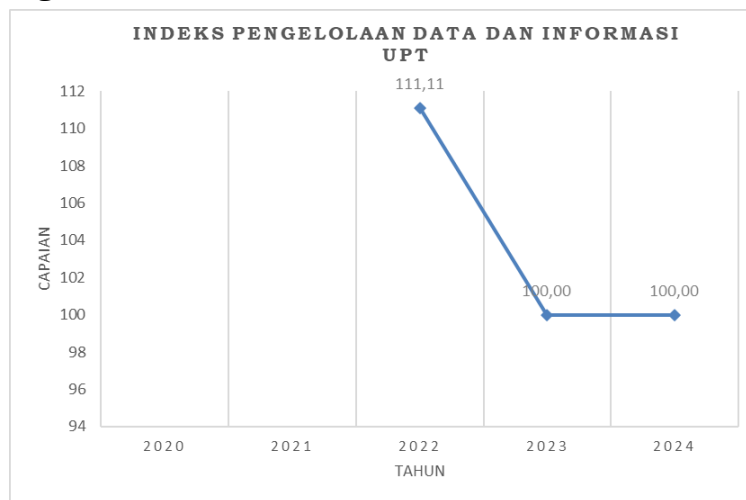
Gambar 38. Sasaran Kegiatan 10 : Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan

Dari grafik tersebut pada tahun 2020 - 2021 BPOM di Tasikmalaya belum terdapat realisasi pada Sasaran Kegiatan 10 ini, pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dengan memperoleh nilai 111.11 hal ini menunjukkan adanya penguatan fungsi laboratorium dan fungsi pengelolaan data dan informasi. Namun, pada tahun 2023 mengalami penurunan dengan nilai sebesar 100 dan mengalami kenaikan pada tahun 2024 menjadi 100.48. Walaupun telah mengalami penurunan,

tetapi Balai POM di Tasikmalaya dapat meningkatkan capainya kembali ditahun berikutnya ini merupakan upaya untuk menjaga konsistensi dalam penguatan laboratorium pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.

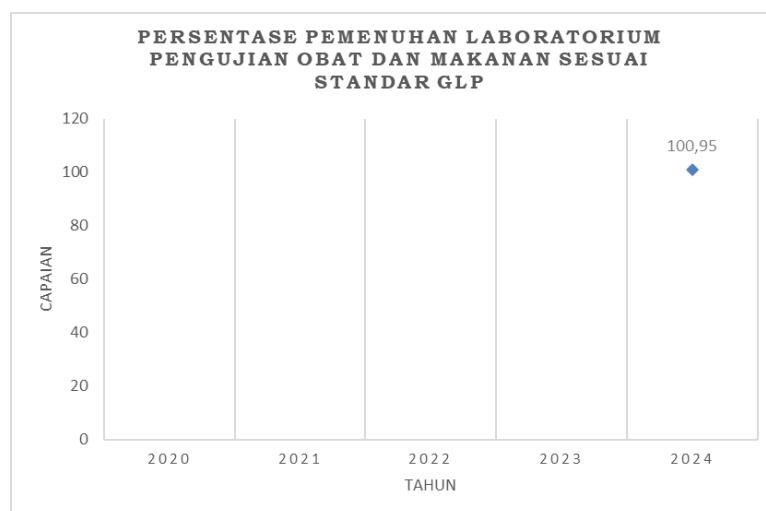
Pada Sasaran Kegiatan 10, Menguatnya Laboratorium Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan, terdapat beberapa indikator, yaitu:

(1) Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT.



Gambar 39. Capaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi UPT
2020 - 2024

(2) Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP.

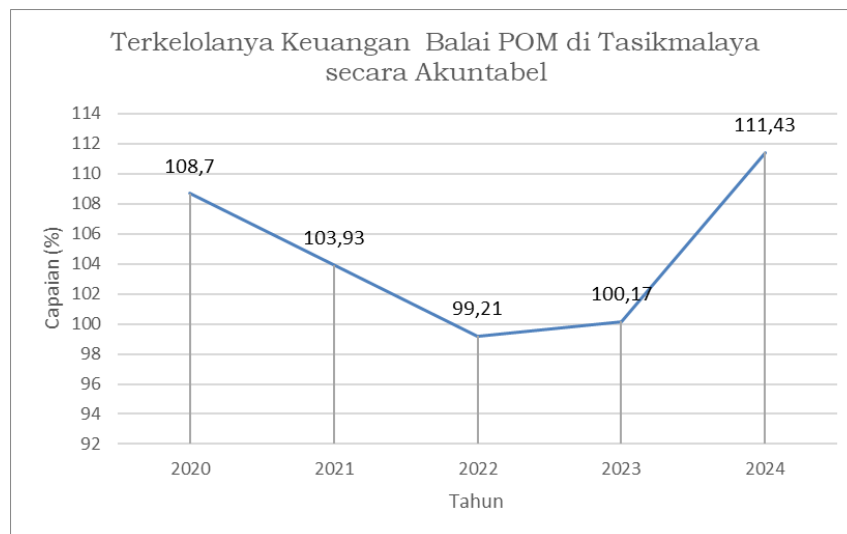


Gambar 40. Capaian persentase pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan sesuai Standar GLP 2020 - 2024

11. Sasaran Kegiatan (SK11)

Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tasikmalaya secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan Balai POM di Tasikmalaya dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat.



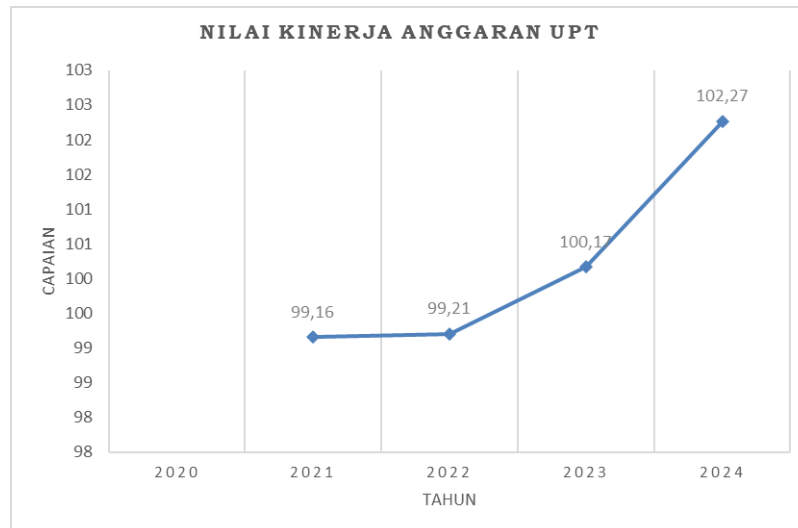
Gambar 41. Sasaran Kegiatan 11 : Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tasikmalaya secara Akuntabel

Grafik di atas menampilkan tren pengelolaan keuangan yang akuntabel di Balai POM Tasikmalaya selama empat tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024. Pada tahun 2020 memperoleh capaian sebesar 108.7 dan 2021 memperoleh capaian nilai sebesar 103.93, menunjukkan pengelolaan keuangan yang baik dan melampaui target. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 99.21, meskipun sedikit di bawah target, masih dalam kategori cukup baik. Di tahun 2023 kembali meningkat dengan capaian 100.17, menandakan perbaikan dan pencapaian target secara tepat. Kinerja yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2024, dengan lonjakan capaian menjadi 125,12, Secara keseluruhan, grafik menunjukkan tren peningkatan yang positif, terutama dalam dua tahun terakhir. Hal ini mencerminkan komitmen kuat Balai

POM Tasikmalaya dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil

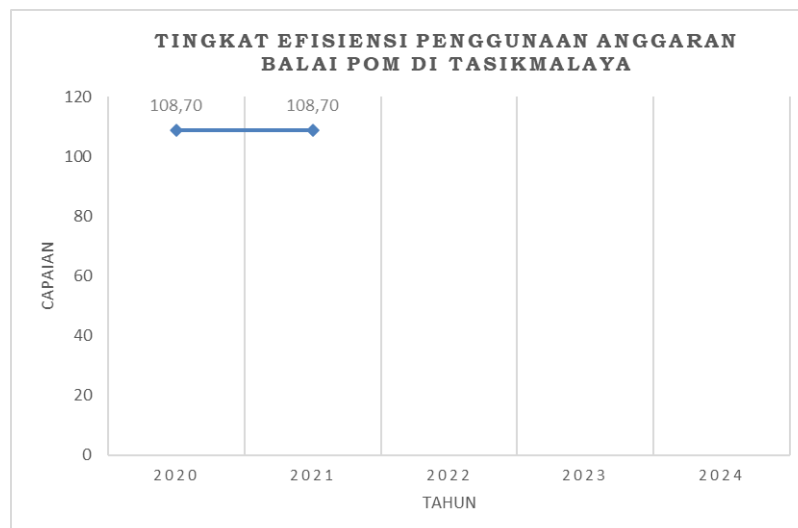
Pada Sasaran Kegiatan 11, Terkelolanya Keuangan Balai POM di Tasikmalaya secara Akuntabel, terdapat beberapa indikator, yaitu:

(1) Nilai Kinerja Anggaran UPT.



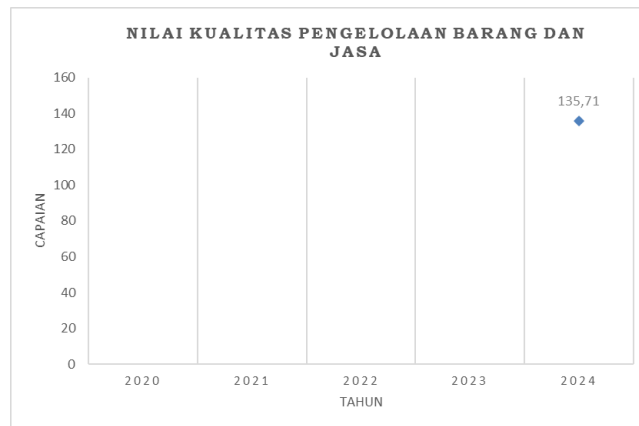
Gambar 42. Capaian Nilai Kinerja Anggaran UPT 2020 – 2024

(2) Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Tasikmalaya.



Gambar 43. Capaian Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Balai POM di Tasikmalaya 2020 – 2024

(3) Nilai Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa.



Gambar 44. Capaian nilai kualitas pengelolaan barang dan jasa
2020 – 2024

(4) Nilai Pengelolaan Barang Milik Negara.



Gambar 45. Capaian nilai pengelolaan barang milik negara 2020 - 2024

(5) Presentase Realisasi Penggunaan Produk dalam Negeri.



Gambar 46. Capaian realisasi penggunaan produk dalam negeri
2020 - 2024

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS11 yaitu: a) penyusunan Laporan Keuangan BPOM; b) meningkatkan capaian kinerja (output dan program) dan melakukan efisiensi anggaran; c) pelaporan kinerja melalui aplikasi SAKTI secara tepat waktu dengan data yang akurat.

1.1.2. Aspirasi Stakeholders

Aspirasi Masyarakat merupakan hal yang sangat penting untuk mendukung efektivitas, pengawasan serta kualitas pelayanan publik di bidang Obat dan Makanan. Dalam menghadapi tantangan masa depan, Balai POM di Tasikmalaya memahami pentingnya upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis, yang dipengaruhi oleh faktor global, kemajuan teknologi, serta perubahan dalam dinamika sosial dan ekonomi, mengharuskan adanya penyesuaian dan respons yang cepat. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi elemen yang sangat penting dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan. Partisipasi aktif masyarakat tidak hanya membantu Balai POM di Tasikmalaya dalam memahami kebutuhan dan harapan mereka, tetapi juga memberikan peluang bagi Balai POM untuk merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif dan efisien dalam merespons perubahan yang terjadi.

Dalam konteks ini, Balai POM di Tasikmalaya berkomitmen untuk selalu berinovasi dan menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat. Dengan berlandaskan pada aspirasi yang dihimpun dari masyarakat, Balai POM di Tasikmalaya merumuskan sebagai berikut :

1. Terlaksananya sinergitas program pengawasan Obat dan Makanan dengan kebijakan daerah.

Masyarakat sangat mengharapkan terlaksananya sinergitas program pengawasan Obat dan Makanan dengan kebijakan daerah karena sinergitas ini secara eksplisit mendukung pilar aman dan bermutu dengan terintegrasinya program pengawasan ke dalam

kebijakan daerah, alokasi sumber daya dan fokus pengawasan agar dapat diselaraskan dengan isu prioritas pada wilayah Tasikmalaya. Sinergitas ini memperkuat upaya Balai POM di Tasikmalaya dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera. Ketika pengawasan menjadi bagian dari kebijakan daerah, hal ini memastikan bahwa perlindungan masyarakat terhadap produk ilegal dan berbahaya tidak hanya menjadi tugas tunggal BPOM, melainkan tanggung jawab bersama pemerintah daerah, yang menghasilkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

2. Timbal balik tindak lanjut lintas sektor

Timbal balik tindak lanjut lintas sektor merupakan suatu mekanisme kerja sama antara berbagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan berbeda namun saling terkait. Tindak lanjut lintas sektor yang efektif menjamin tidak ada celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Hal ini tidak hanya melindungi masyarakat agar sehat dan sejahtera dari risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh produk ilegal, tetapi juga mendukung visi BPOM untuk berdaya saing dengan menciptakan level *playing field* yang adil bagi pelaku usaha legal dan patuh.

Dengan adanya mekanisme ini, Balai POM di Tasikmalaya dapat memastikan bahwa respons terhadap temuan masalah keamanan pangan dan obat menjadi lebih komprehensif, terkoordinasi, dan terintegrasi, yang merupakan ciri dari tata kelola yang efektif dalam mendukung agenda Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

3. Mendapatkan jaminan mutu Obat dan Makanan

Memperoleh jaminan mutu Obat dan Makanan merupakan harapan dari Masyarakat umum kepada Balai POM di Tasikmalaya untuk memastikan setiap produk yang beredar telah memenuhi standar keamanan, kualitas, dan khasiat yang ditetapkan sehingga secara langsung mewujudkan sediaan farmasi dan pangan olahan

yang aman, bermutu dan berdaya saing sesuai dengan visi BPOM 2025-2029.

4. Mendapatkan informasi terkait peraturan dan kebijakan tentang praktik kefarmasian

Masyarakat khususnya para professional Kesehatan dan pelaku usaha pada bidang kefarmasian, mengharapkan informasi terkait peraturan dan kebijakan mengenai praktik kefarmasian. Pemahaman yang memadai terhadap peraturan, seperti standar pelayanan kefarmasian di apotek atau distribusi obat yang baik, menjamin bahwa pelayanan dan pengadaan sediaan farmasi dilakukan sesuai prosedur. Hal ini untuk memastikan obat yang distribusikan kepada Masyarakat adalah produk yang aman dan mempertahankan mutu serta khasiatnya.

Akses informasi regulasi yang jelas dan asistensi terkait implementasinya membantu sarana kefarmasian dan industri terkait beroperasi dalam kepatuhan hukum. Ini mendorong praktik yang profesional dan akuntabel, yang pada gilirannya meningkatkan daya saing layanan kefarmasian secara keseluruhan, mendukung agenda Indonesia Maju.

5. Mendapatkan informasi dan asistensi dalam pengurusan perizinan BPOM bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dalam hal informasi para pelaku UMKM mengharapkan Balai POM di Tasikmalaya menyediakan kemudahan materi edukasi dan panduan perizinan yang dapat dipahami serta disebarluaskan melalui saluran yang mudah diakses, baik secara *online* maupun *offline*. Selain itu para pelaku usaha juga sangat membutuhkan adanya pendampingan praktis mulai dari penyiapan sarana produksi sesuai standar Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) sampai dengan penyelesaian dokumen administratifnya. Petugas yang responsif dan kompeten dapat mempermudah dan

mempercepat produk-produk UMKM di wilayah Tasikmalaya untuk memiliki izin edar yang legal dan siap bersaing dipasar yang lebih luas. Hal ini dapat mewujudkan pangan olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045, sesuai dengan visi BPOM 2025-2029.

Selaras dengan arah kebijakan BPOM pusat, Balai POM di Tasikmalaya menempatkan aspirasi dan partisipasi masyarakat sebagai fondasi utama dalam penyusunan Rencana Strategis 2025–2029. Survei ini menjadi landasan penting dalam memahami persepsi publik terhadap efektivitas pengawasan, kebutuhan informasi, dan harapan masyarakat terhadap layanan Balai POM di Tasikmalaya.

Aspirasi masyarakat juga membantu Balai POM di Tasikmalaya dalam memahami bagaimana perubahan lingkungan strategis, seperti perkembangan teknologi digital dan perubahan demografis, dapat mempengaruhi pola konsumsi obat dan makanan. Hal ini penting agar Balai POM di Tasikmalaya dapat menyesuaikan kebijakan dan mekanisme pengawasan untuk tetap relevan dan efektif. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam penjangkaran aspirasi ini. Setiap masukan akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis Balai POM di Tasikmalaya 2025-2029. Bersama-sama, kita dapat memastikan bahwa pengawasan obat dan makanan di Indonesia tidak hanya memenuhi standar global, tapi juga menanggapi kebutuhan dan aspirasi masyarakat Indonesia secara khusus.

I.2.Potensi dan Permasalahan

Guna menyesuaikan tantangan yang akan dihadapi pada periode akhir RPJPN Indonesia, Balai POM di Tasikmalaya memahami potensi dan permasalahan di masa mendatang adalah kunci merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan berdaya saing baik secara nasional maupun global. Dalam memahami potensi dan permasalahan Balai POM di Tasikmalaya dengan

melihat kondisi nyata mengenai potensi yang membantu untuk melihat kekuatan dan peluang serta permasalahan yang dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan hambatan.

Balai POM di Tasikmalaya merupakan institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerjanya. Sejalan dengan budaya kerja BPOM yaitu responsif, Balai POM di Tasikmalaya menyelaraskan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam penyusunan rencana strategis Balai POM di Tasikmalaya 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, BPOM diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam perjalanan RPJMN 2025-2029, Balai POM di Tasikmalaya menetapkan rencana strategis yang tepat, efektif dan akurat berlandaskan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity dan Threat*). Melalui metode ini, organisasi dapat mengidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Balai POM di Tasikmalaya dan juga peluang serta ancaman eksternal yang mempengaruhi kinerja organisasi di kemudian hari.

I.2.1. Kekuatan (Strength)

Analisis kondisi internal organisasi dengan tujuan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki Balai POM di Tasikmalaya, dapat membantu memahami dan mengevaluasi sumber daya, kapabilitas, dan aspek strategis yang memberikan Balai POM di Tasikmalaya keunggulan dalam menjalankan tugas pengawasannya. Identifikasi kekuatan ini tidak hanya vital dalam mempertahankan efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, tetapi juga esensial dalam

merencanakan pengembangan strategis yang akan memperkuat posisi Balai POM di Tasikmalaya di masa depan. Berikut ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Balai POM di Tasikmalaya, yang merupakan aset penting dalam menjalankan tugas dan fungsinya:

1. Komitmen kepemimpinan yang kuat

Dalam membangun fondasi yang kuat untuk keberhasilan dan keefektifan jangka panjang, kepemimpinan di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya telah memperlihatkan komitmen yang kuat dan visioner terhadap pencapaian visi dan misi organisasi. Kepemimpinan yang strategis, progresif dan inovatif sangat penting dalam memastikan Balai POM di Tasikmalaya mampu menavigasi lingkungan yang terus berubah dengan kompleksitas dan dinamika yang meningkat. Dengan fokus pada pengawasan obat dan makanan yang aman dan berkualitas, kepemimpinan memastikan BPOM tidak hanya beradaptasi dengan tantangan saat ini tetapi juga proaktif mengantisipasi perubahan di masa depan. Melalui penerapan strategi yang matang dan pengambilan keputusan yang bijaksana, kepemimpinan BPOM berusaha meningkatkan standar pengawasan, mendorong pengembangan metode baru, dan memperkuat sistem pengawasan untuk melindungi kesehatan masyarakat. Komitmen yang kuat dari kepemimpinan BPOM menciptakan lingkungan kerja yang responsif dan adaptif, yang vital dalam menumbuhkan kemampuan organisasi untuk berinovasi dan berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan Kepemimpinan yang efektif menanamkan nilai-nilai adaptabilitas dan keberlanjutan, mempromosikan kolaborasi lintas sektor, dan mendorong pemanfaatan teknologi terkini dalam pengawasan obat dan makanan. Komitmen kepemimpinan Balai POM di Tasikmalaya atas kolaborasi ditunjukkan dengan jumlah kerja sama aktif BPOM yang dibina sampai dengan 2024 sebanyak 3 kerja sama yang terdiri dari pemerintah daerah dalam sektor pelayanan publik dan institusi pendidikan.

Selain itu komitmen pemanfaatan teknologi Balai POM di Tasikmalaya terlihat dengan digitalisasi seluruh pengawasan baik *pre-market* dan *post-market* yang saling terintegrasi dan adanya *interoperabilitas* antar data dalam kerangka Satu Data BPOM.

Inisiatif kepemimpinan ini tidak hanya memastikan BPOM tetap relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat dan industri terhadap lembaga. Dengan demikian, kepemimpinan Balai POM di Tasikmalaya telah memposisikan organisasi sebagai lembaga pengawas yang dinamis dan terdepan, yang berkomitmen untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pengawasan obat dan makanan yang ketat, adil, dan transparan, serta merespons cepat terhadap perkembangan global dan dalam negeri di bidang obat dan makanan. Beberapa penghargaan yang diperoleh Balai POM di Tasikmalaya sebagai bukti nyata komitmen untuk terus berkembang adalah sebagai berikut:

- a. UPT dengan kualifikasi “Informatif” berdasarkan pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024
- b. Terbaik ke-2 unit kearsipan III dengan kategori AA tahun 2023
- c. 10 Satker dengan respon tercepat dan lengkap dalam pengiriman laporan BMN untuk semester I tahun 2023

2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid

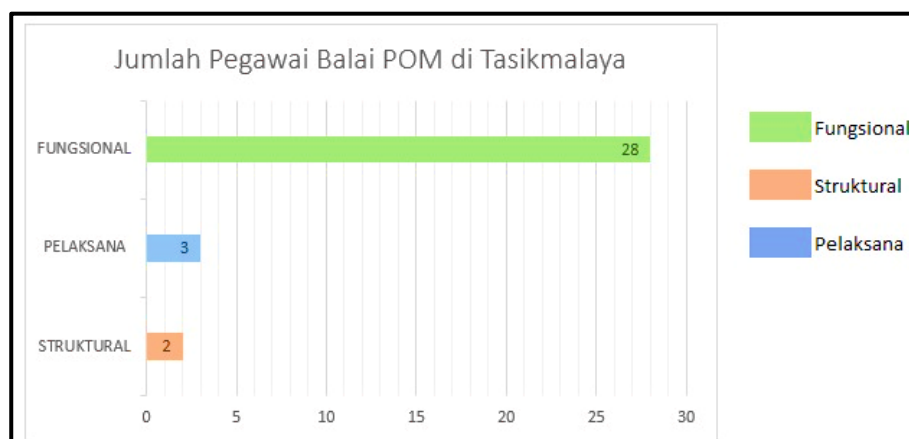
Balai POM di Tasikmalaya telah membangun dan memelihara kolaborasi strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah lainnya, asosiasi profesi, pelaku usaha obat dan makanan. Kerjasama ini memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat, akses ke teknologi terbaru, pengetahuan dan praktik terbaik, yang secara signifikan meningkatkan kemampuan Balai POM di Tasikmalaya dalam mengawasi produk obat dan makanan yang beredar. Melalui kerjasama dengan

berbagai stakeholder, Balai POM di Tasikmalaya dapat memperkuat sistem pengawasan obat dan makanan di wilayah kerjanya.

Saat ini Balai POM di Tasikmalaya memiliki dua kerjasama aktif dengan pemerintah Kota Tasikmalaya untuk Sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kota Tasikmalaya dan Universitas Perjuangan Tasikmalaya untuk Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan. Balai POM di Tasikmalaya terus meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor dengan menjajaki kemungkinan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi maupun organisasi masyarakat guna meningkatkan tugas fungsi Balai POM di Tasikmalaya dalam melakukan pengawasan Obat dan Makanan.

3. Memiliki SDM yang Kompeten

Sumber daya manusia yang kompeten menjadi kunci keberhasilan dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan. Dengan mengedepankan dedikasi dan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi dengan tujuan utama menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan bagi Masyarakat. Untuk dapat melakukan pengawasan obat dan makanan dibutuhkan kompetensi teknis dengan kriteria spesifik sesuai dengan tugas fungsi pada setiap jabatannya. Upaya peningkatan kompetensi dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan, sertifikasi keahlian, penguasaan teknologi terkini, serta pembinaan yang mendukung pengembangan profesionalisme dan integritas. Dalam memenuhi kebutuhan kompetensi teknis spesifik tersebut, Balai POM di Tasikmalaya memiliki 28 pegawai dengan spesialisasi jabatan yang spesifik. Sampai dengan Tahun 2024 terdapat 34 pegawai dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 47. Jumlah pegawai Balai POM di Tasikmalaya Berdasarkan Tipe Pegawai

Pada gambar 47, dapat diketahui bahwa Balai POM di Tasikmalaya memiliki 28 pegawai fungsional, 3 pegawai pelaksana dan 2 pegawai struktural. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1.	Kepala Balai POM di Tasikmalaya	1
2.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1
3.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	3
4.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	16
5.	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	1
6.	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	1
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2
8.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
9.	Pranata Keuangan APBN Terampil	1
10.	Pranata Komputer Terampil	1
11.	Operator Layanan Operasional	1
12.	Perencana Ahli Pertama	1
13.	Penata Laksana Barang Terampil	1

14.	Pranata SDM Aparatur Terampil	1
15.	Penata Layanan Operasional	2
Total		34

4. Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal

Pelayanan publik yang optimal berfokus pada kemudahan akses, kecepatan, akurasi, dan transparansi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Komitmen Balai POM di Tasikmalaya dalam menjamin kualitas pelayanan publik dengan melaksanakan evaluasi secara berkala dan memberikan wadah untuk saran dan kritik demi peningkatan pelayanan publik yang lebih optimal. Inovasi dalam lingkup pelayanan publik menjadi salah satu indikator bahwa Balai POM di Tasikmalaya mengedepankan pelayanan publik yaitu adanya program Ngulisik dan Jelantik (Nguji Nguriling Balai POM di Tasikmalaya dan Jemput Bola Layanan Balai POM di Tasikmalaya). Inovasi ini berfokus pada pelayanan jemput bola langsung ke masyarakat serta pemberian akses informasi berbasis teknologi yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi seputar obat dan makanan melalui scan QR Code. Selain itu, Pembinaan terhadap pelaku usaha dalam proses perizinan berusaha obat dan makanan dalam bentuk pelayanan desk sertifikasi dan desk registrasi yang mampu menghasilkan izin/rekomendasi serta izin edar yang diterbitkan pada hari yang sama menjadi bukti pencapaian Balai POM di Tasikmalaya dalam penyederhaan perizinan berusaha.

5. Kelembagaan yang Diperkuat

Kelembagaan yang kuat merupakan fondasi utama bagi efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Tasikmalaya. Kekuatan kelembagaan tersebut diwujudkan melalui pembentukan struktur organisasi yang jelas, transparan, dan berorientasi pada hasil, di mana setiap unit kerja memiliki pembagian tugas, tanggung jawab, serta rantai komando yang

terdefinisi dengan baik. Selain itu, diperlukan mekanisme koordinasi antar unit yang efektif dan berkesinambungan, baik melalui rapat koordinasi rutin, sistem komunikasi internal yang terpadu, maupun pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat alur informasi dan pengambilan keputusan. Balai POM di Tasikmalaya membagi pekerjaan berdasarkan tim kerja sesuai dengan fungsi yang membantu dalam pencapaian tujuan sasaran strategis.

Upaya peningkatan kapasitas kelembagaan juga mencakup penyesuaian kebijakan organisasi agar selaras dengan dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penyediaan alokasi anggaran yang memadai dan tepat sasaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pelayanan publik. Di samping itu, penguatan sinergi dan kolaborasi dengan lembaga terkait, seperti pemerintah daerah, instansi penegak hukum, lembaga kesehatan, serta pelaku usaha, menjadi faktor penting dalam memperluas jangkauan dan efektivitas pengawasan obat dan makanan.

Dengan kelembagaan yang kokoh dan adaptif, Balai POM di Tasikmalaya akan mampu membangun koordinasi lintas unit kerja yang solid, sehingga dapat menghadapi berbagai tantangan yang timbul akibat perubahan kebijakan, perkembangan teknologi, maupun peningkatan risiko peredaran produk yang tidak memenuhi standar keamanan. Kelembagaan yang kuat ini juga akan mendorong peningkatan kinerja organisasi secara menyeluruh, baik dari segi kecepatan layanan, akurasi pengawasan, maupun tingkat kepuasan masyarakat.)

6. Pemanfaatan sistem teknologi informasi

Teknologi informasi dimanfaatkan untuk mendukung efisiensi dan transparansi pengawasan, termasuk melalui sistem digitalisasi data, pelacakan produk, layanan perizinan daring, dan pemantauan real-time. Pemanfaatan teknologi juga membantu

meningkatkan kecepatan respon terhadap risiko dan memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat.

I.2.2. Kelemahan (*Weakness*)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Balai POM di Tasikmalaya tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek - aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai POM di Tasikmalaya dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai POM di Tasikmalaya dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (*weakness*) yang dimiliki oleh BPOM, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas sesuai analisa beban kerja

Jumlah SDM yang belum memadai dapat berdampak terhadap efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan data siren SDM Balai POM di Tasikmalaya memiliki gap dalam pemenuhan jumlah dan kompetensi SDM sesuai dengan analisa dari beban kerja. Hal ini membatasi tugas dan fungsi Balai POM di Tasikmalaya dalam memberikan pelayanan pada masyarakat untuk mengawasi obat dan makanan yang aman dan bermutu. Karena belum optimalnya jumlah SDM akan berdampak pada tingginya peredaran produk Obat dan Makanan di Masyarakat yang tidak terjamin keamanannya. Selain itu gap SDM dapat menghambat optimalisasi kemampuan masing-masing SDM untuk berkontribusi pada organisasi dikarenakan memiliki beban kerja yang berlebih.

Adanya GAP dalam pengembangan kompetensi pegawai tahun 2025 Balai POM di Tasikmalaya antara kompetensi yang dimiliki dengan standar kompetensi jabatan, menjadi salah satu kelemahan internal Balai POM di Tasikmalaya. Seperti belum terlaksananya Pelatihan Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Level 1 pada jabatan Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama, CDOB, Bimbingan Teknis Pengawas Pangan, Teknis SMKPO dan Audit Surveilans pada jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan tugas pengawasan, pelayanan publik, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi serta kebijakan baru di bidang pengawasan obat dan makanan.

Gap ini menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi belum sepenuhnya optimal, terutama dalam menghadapi dinamika perkembangan teknologi, regulasi, serta inovasi di bidang pengawasan obat dan makanan. Keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi, analisis data, dan komunikasi publik juga berdampak pada efektivitas pelaporan serta pelayanan kepada masyarakat. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia secara berkelanjutan melalui pelatihan, pendampingan, dan pengembangan karier yang terencana dan terarah.

Tabel 4. Data SIREN Per Oktober 2025

No	Jabatan	ABK	Jumlah Pegawai	Gap
1.	Kepala Balai POM di Tasikmalaya	1	1	0
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha	1	1	0
3.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	0	1
4.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	2	2	0
5.	Arsiparis Mahir	1	0	1
6.	Arsiparis Terampil	1	0	1

7.	Penata Laksana Barang Terampil	3	1	2
8.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Madya	5	0	5
9.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	14	3	11
10.	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	16	16	0
11.	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	0	1	-1
12.	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	0	1	-1
13.	Perencana Ahli Muda	1	0	1
14.	Perencana Ahli Pertama	1	1	0
15.	Pranata Keuangan APBN Mahir	1	1	0
16.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	0	1
17.	Pranata Keuangan APBN Terampil	1	1	0
18.	Pranata Komputer Mahir	1	0	1
19.	Pranata Komputer Terampil	1	1	0
20.	Pranata SDM Aparatur Mahir	1	0	1
21.	Pranata SDM Aparatur Terampil	1	1	0
22.	Operator Layanan Operasional	0	1	-1
23.	Penata Layanan Operasional	0	2	-2

Berdasarkan perhitungan kebutuhan ASN (Analisis Beban Kerja) di lingkungan Balai POM di Tasikmalaya Tahun 2025- 2029, kebutuhan SDM adalah 59 orang dengan jumlah pegawai eksisting saat ini 34 orang (data SIASN per 30 Oktober 2025). Persentase pemenuhan SDM BPOM sampai dengan saat ini 57.63%. Masih terdapat kekurangan SDM sebanyak 25 orang. Jumlah SDM Balai POM di Tasikmalaya yang aktif sampai dengan Oktober 2025, sebanyak 34 pegawai terdiri dari 15 pegawai laki-laki dan 19 pegawai perempuan. Sedangkan jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pegawai BPOM memiliki tingkat pendidikan S1 sejumlah 13 pegawai (52%), diikuti Profesi sebanyak 6 pegawai (24%), D3 sebanyak 4 orang (16%), S2 sejumlah 1 pegawai (4%), dan tingkat SD sebanyak 1 pegawai (4%). (Jumlah sumber daya manusia (SDM) untuk pelaksanaan pengawasan obat

dan makanan di Balai POM di Tasikmalaya belum memadai sehingga berdampak signifikan terhadap efektivitas tugas pengawasan. Analisis beban kerja menunjukkan adanya gap baik dalam hal jumlah maupun kompetensi SDM yang ideal sesuai cakupan wilayah kerja dan kompleksitas tugas pengawasan.

Wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya meliputi wilayah Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran dengan luas wilayah $\pm 6.142,3 \text{ km}^2$ dan jumlah penduduk sekitar 4,1 juta jiwa. Di area ini terdapat lebih dari 5.183 sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang diawasi.

Sedangkan, berdasarkan data nasional dari sistem kepegawaian Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk seluruh UPT Balai Besar/Balai POM tercatat sebanyak 3.543 pegawai. Namun, data spesifik mengenai berapa jumlah pegawai di Balai POM di Tasikmalaya tidak terpublikasi secara eksplisit.

Dari perbandingan ini dapat diilustrasikan bahwa jika satu unit pengawasan (Balai) yang cakupannya sangat luas hanya mengandalkan sebagian kecil dari jumlah pegawai nasional total, maka beban per-pegawai akan sangat tinggi.

2. Sarana dan Prasarana belum memadai

Kondisi eksisting saat ini Balai POM di Tasikmalaya belum memiliki gedung kantor maupun laboratorium sendiri sehingga masih menempati fasilitas sementara yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan operasional Lembaga. keterbatasan ruang kerja, ruang pelayanan publik, serta ruang laboratorium yang *representative* hal ini dapat menghambat kelancaran pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan, terutama dalam hal pengujian sampel dan pelayanan masyarakat. Karena keterbatasan ini, pelayanan yang diberikan oleh Balai POM di Tasikmalaya menjadi kurang optimal. Selain bangunan kantor, Balai POM di Tasikmalaya juga masih belum memenuhi standar

dan prasarana sesuai dengan Peraturan Badan POM nomor 15 tahun 2021 tentang Standar Sarana Prasarana Kantor di Lingkungan Badan POM hal tersebut dapat berdampak pada pencapaian kinerja menjadi tidak maksimal.

3. Kemampuan uji laboratorium belum maksimal

Dengan banyaknya peredaran produk obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya maka harus diiringi dengan pengawasan post market yang maksimal, salah satu faktor dalam pengawasan post market diantaranya yaitu dengan melakukan pengujian laboratorium. Pengujian di laboratorium Balai POM di Tasikmalaya belum maksimal dikarenakan keterbatasan pada pemenuhan standar kemampuan laboratorium. Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024, standar kemampuan laboratorium Balai POM di Tasikmalaya sebesar 40.38%. Faktor utama dalam pemenuhan SKL diantaranya yaitu ketersediaan peralatan laboratorium yang memadai dan SDM pengujian yang kompeten.

4. Masih banyaknya kendala dalam penggunaan sistem TI

Berkembang pesatnya sistem TI di masa sekarang berdampak pada munculnya banyak inovasi-inovasi berbasis pada sistem TI namun dengan bertambahnya jumlah tersebut tidak diiringi dengan pemanfaatan sistem yang optimal. Masih banyaknya kendala dalam pengembangan sistem TI mengakibatkan terhambatnya proses pelayanan pada masyarakat.

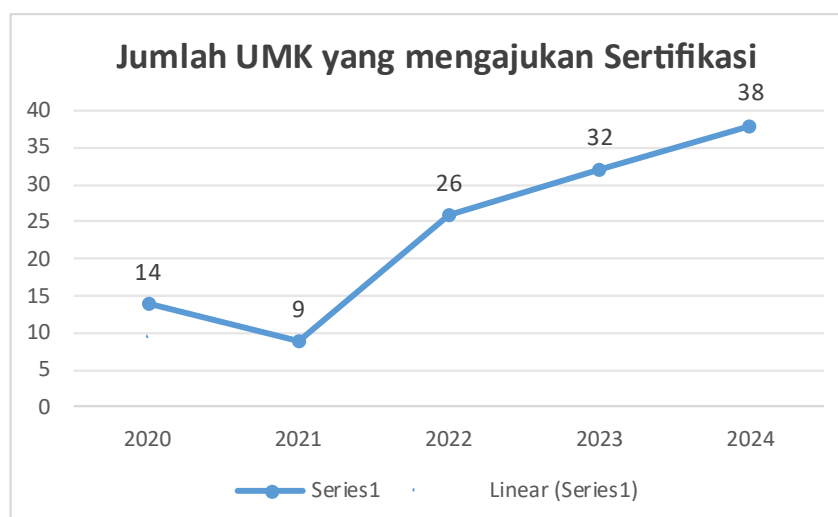
I.2.3. Peluang (*Opportunity*)

Komponen peluang (*opportunity*) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan obat dan makanan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi BPOM untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang proaktif dan

inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan obat dan makanan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh BPOM untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Obat dan Makanan:

1. Pertumbuhan Pasar dan Perkembangan UMKM Obat dan Makanan yang sangat pesat di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Pasar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi Balai POM di Tasikmalaya untuk memperluas dan meningkatkan kualitas fungsi pengawasannya. BPOM sebagai institusi yang mengatur regulasi obat dan makanan memiliki peran strategis dalam memastikan produk yang beredar sesuai dengan standar keamanan dan kualitas yang dipersyaratkan. Hal ini tentunya tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses produk yang aman dan bermutu, tetapi memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.



Gambar 48. Trend UMK yang mengajukan Sertifikasi

Grafik diatas menunjukkan tren jumlah Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang telah mengajukan sertifikasi selama periode 2020-

2024. Secara keseluruhan, terlihat adanya peningkatan signifikan dalam jumlah UMK yang mengajukan sertifikasi. Peningkatan ini menunjukkan bahwa Balai POM di Tasikmalaya berhasil dalam menjalankan pendampingan dan fasilitasi yang efektif dalam mendorong dan memotivasi UMK untuk mengurus sertifikasi

Balai POM di Tasikmalaya memiliki peran untuk melakukan fasilitasi peningkatan daya saing industri obat dan makanan di wilayah priangan timur. Melalui penerapan standar produksi yang baik seperti Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Tahapan yang dilakukan dapat berupa pendampingan pada pelaku usaha, bimbingan teknis dan fasilitasi akses untuk melakukan registrasi produknya agar dapat memberikan izin edar. Dengan demikian, BPOM tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga sebagai fasilitator dalam peningkatan kualitas industri obat dan makanan, membantu mereka untuk bersaing lebih efektif di pasar global dan menembus pasar ekspor yang lebih luas.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BPOM kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BPOM dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

Dari perspektif strategis, upaya BPOM dalam meningkatkan daya saing industri obat dan makanan dalam negeri memiliki implikasi yang luas terhadap ekonomi dan kesehatan masyarakat. Pertama, dengan meningkatkan akses pasar ekspor, industri dalam negeri dapat menikmati pertumbuhan ekonomi dan penciptaan

lapangan kerja, yang pada gilirannya berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional. Kedua, komitmen terhadap standar internasional dalam produksi obat dan makanan memastikan bahwa masyarakat luas mendapatkan akses terhadap produk yang aman, berkualitas, dan terjangkau. Hal ini secara tidak langsung meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban penyakit yang dapat dicegah. Selain itu, posisi industri obat dan makanan Indonesia yang kuat di pasar global akan memperkuat reputasi negara sebagai produsen obat dan makanan yang bertanggung jawab dan inovatif, mempromosikan keunggulan kompetitif di tingkat internasional.

2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan obat dan makanan. Adaptasi dengan perkembangan teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat. Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis ini merupakan langkah maju untuk menuju peningkatan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan

pemantauan kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan mempengaruhi masyarakat luas.

BPOM berhasil mengintegrasikan aplikasi yang ada di BPOM sebanyak 113 aplikasi sejak tahun 2019-2024. Pengintegrasian yang dimaksud adalah kondisi dimana seluruh sistem informasi pengawasan obat dan makanan saling terhubung dan menghasilkan informasi yang komprehensif. Aktivitas integrasi sistem informasi dilakukan melalui seluruh atau sebagian dari beberapa komponen pengintegrasian, yaitu Terintegrasi dengan OSS, Web Reg, Single Sign On, Tampilan Data Terintegrasi (BCC), E-Payment, KSWP, Data Lake, Gateway COVID, TTE, dan integrasi lainnya yang melibatkan lebih dari 1 aplikasi.

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning*. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan *machine learning* dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional. *Artificial Intelligence* (AI) dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren terhadap data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen untuk mendeteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, *machine learning* dapat membantu dalam memprediksi potensi

wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan. Sebagai Unit Pelaksana Teknis di Badan POM, Balai POM di Tasikmalaya berkomitmen untuk memanfaatkan inovasi implementasi teknologi yang dirancang oleh pusat dan juga Balai POM di Tasikmalaya dapat merespon perkembangan teknologi dengan menerapkan teknologi dalam pemberian layanan publik di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya.

3. Menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan

Peluang BPOM untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi internasional, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BPOM dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini.

Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan, sementara kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu BPOM menyelaraskan regulasinya dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan BPOM, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam obat

dan makanan, atau kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan makanan dalam negeri. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra global. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

4. Kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu semakin meningkat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BPOM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Indeks efektivitas KIE diperoleh melalui survei efektivitas KIE kepada responden yang pernah menerima KIE BPOM. Capaian indeks efektivitas KIE pada kurun waktu Tahun 2019-2023 terus

meningkat, Pada tahun 2023, indeks efektivitas KIE mencapai 94,42 atau berada pada kategori Sangat Efektif. Berdasarkan capaian indeks efektivitas KIE tahun 2019-2023 terlihat bahwa terjadi peningkatan untuk setiap komponen indikatornya.

Indikator yang paling tinggi kontribusinya adalah Indikator Pemahaman yang artinya peserta KIE dapat memahami materi KIE yang diberikan, sedangkan indikator yang memiliki indeks terendah adalah minat yang artinya perlu ditingkatkan lagi upaya untuk meningkatkan minat masyarakat dalam KIE Obat dan Makanan melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan KIE baik dari konsep kegiatan, materi/konten, narasumber, media yang dipilih dan lain-lain.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BPOM untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

I.2.4. Ancaman (Threat)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis BPOM. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga BPOM dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah

beberapa komponen Ancaman (Threat) yang dapat mempengaruhi BPOM dalam penyusunan rencana strategisnya selama lima tahun yang akan datang, yaitu :

1. *E-commerce* dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan

Perkembangan teknologi dan adanya revolusi sosial (*society 5.0*) yang terjadi hari ini secara tidak langsung mengubah perilaku masyarakat selaku konsumen dalam melakukan transaksi perdagangan, termasuk berubahnya pola jual-beli produk obat dan makanan. Perubahan ini telah nyata terjadi di masyarakat yang dengan mudah menjangkau dan mengakses informasi mengenai kebutuhan obat dan makanannya sehari-hari hanya lewat sentuhan jari dari ponselnya kapan pun dan dimanapun mereka berada tanpa harus bepergian. Tanpa kita sadari, setiap platform *e-commerce* terus berupaya untuk berkembang dan berinovasi guna menghadirkan peningkatan kemudahan dan kecepatan bagi konsumennya hari demi hari. Namun, perkembangan ini menimbulkan sejumlah resiko seperti potensi kejahatan siber terhadap produk obat dan makanan. Kejahatan ini mencakup penjualan produk palsu, kedaluwarsa, atau yang tidak memenuhi standar keamanan dan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Beberapa platform seringkali kurang dimanfaatkan dengan bijak dan dijadikan sebagai celah untuk memperjualbelikan produk obat dan makanan ilegal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dikarenakan sistem *user generated content* (UGC) yang diterapkan pada Penyelenggara Sistem Elektronik memungkinkan setiap pengguna dapat dengan mudah untuk membuat akun dan membuat unggahan untuk mempromosikan produk-produknya pada platform *e-commerce*. Kejahatan siber sejatinya tidak hanya dilakukan dalam bentuk penipuan daring, pencurian identitas, dan peretasan, tetapi juga dilakukan terhadap penjualan daring produk obat dan makanan ilegal yang memang membahayakan kesehatan masyarakat.

Tantangan besar yang dimiliki BPOM untuk menjaga keamanan produk obat dan makanan tidak hanya dilakukan terhadap produk-produk lokal, tetapi juga terhadap produk-produk impor. Hal ini penting karena proses identifikasi terhadap produk tersebut harus dilakukan dengan tepat sebagai Upaya penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan terhadap produk obat dan makanan ilegal.

Jika tidak ditangani dengan benar, maka akan memungkinkan timbulnya resiko kejahatan Masyarakat yang akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kemudahan akses bagi konsumen untuk memperoleh produk-produk tersebut melalui *e-commerce*. Maka dari itu BPOM memiliki tantangan dalam mengimplementasikan pengawasan dan penegakan hukum yang tepat dan tegas dalam menghadapi ancaman kejahatan siber obat dan makanan dalam setiap perkembangan teknologi yang kian pesat.

2. Dinamika pasar yang cepat

Dinamika pasar yang cepat dalam industri obat dan makanan mempresentasikan sebuah ancaman yang signifikan bagi BPOM dalam menjalankan tugas pengawasannya. Perubahan yang terjadi secara cepat ini menuntut kebijakan yang dinamis dan adaptif untuk memastikan efektivitas dan relevansi regulasi. Khususnya, munculnya produk baru hasil terobosan penelitian dan pengembangan menantang BPOM untuk terus mengupdate pengetahuan dan metodologi pengawasan. Produk-produk ini, yang mungkin memiliki komposisi atau mekanisme kerja unik, memerlukan evaluasi keamanan dan efikasi yang tepat untuk memastikan perlindungan konsumen.

Selain itu, adopsi teknologi produksi yang berkembang seperti bioteknologi dan nanoteknologi menghasilkan produk yang lebih kompleks, membutuhkan pendekatan pengawasan yang berbeda dari yang tradisional. Untuk menghadapi hal tersebut BPOM perlu mengadaptasi teknik pengujian dan analisisnya agar selaras dengan

perkembangan teknologi dan kompleksitas produk yang dihasilkan. Tantangan lainnya adalah kebutuhan regulasi yang fleksibel, yang dapat diadaptasi dengan cepat sesuai dengan perubahan pasar, serta ketepatan waktu dalam memperbarui regulasi dan standar keamanan produk. Keterlambatan dalam proses ini dapat menciptakan celah keamanan yang berpotensi dimanfaatkan oleh produk-produk baru yang belum sepenuhnya dievaluasi. Dinamika pasar yang cepat ini, dengan segala aspek kunci yang terlibat, memperjelas kompleksitas tantangan yang dihadapi BPOM dalam menjaga keamanan produk obat dan makanan di tengah perkembangan industri yang terus bergerak.

3. Koordinasi antar lembaga belum sinergis

Tantangan dalam sinkronisasi kebijakan menjadi semakin kompleks dengan adanya kebutuhan untuk memastikan konsistensi kebijakan pengawasan Obat dan Makanan yang tidak kontradiktif dengan kebijakan sektoral lainnya. Dinamika politik dan perubahan prioritas pemerintah juga dapat mempengaruhi kebijakan yang sedang dikembangkan, menuntut fleksibilitas dan kemampuan adaptasi yang tinggi dari BPOM. Manajemen informasi antarlembaga juga menjadi krusial, dimana efektivitas pengawasan bergantung pada pertukaran informasi yang lancar. Membangun sistem manajemen informasi terpadu yang memungkinkan berbagi data secara real-time adalah solusi yang ideal, namun hal ini juga menghadirkan tantangan teknis dan administratif yang tidak sedikit. Kurang efektifnya koordinasi BPOM dengan lintas sektor (antar lembaga), antara lain Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Daerah dapat menghambat kemampuan BPOM dalam menciptakan sistem pengawasan yang terpadu dan komprehensif. Panjangnya rantai koordinasi mengakibatkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih lambat terutama untuk kebutuhan respon cepat dalam situasi krisis. Lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh perbedaan kepentingan dan prioritas Kementerian/Lembaga

berpotensi memperlambat pemberian respon sehingga mempengaruhi kelancaran pelayanan publik BPOM.

Sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk membentuk Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan. Di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya seluruh pemerintah daerah telah membentuk Tim Koordinasi Keamanan Pangan di wilayahnya masing-masing namun dari 5 wilayah yang telah memiliki SK TKPPOM hanya 4 wilayah yang melibatkan BPOM dalam tim tersebut. Balai POM di Tasikmalaya berupaya untuk melakukan advokasi dengan pemerintah daerah setempat agar senantiasa bersinergis dalam pengawasan obat dan makanan.

4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan

Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan yang disusun oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi kunci utama dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan tersebut. Hal ini menimbulkan tantangan multidimensi yang harus dikelola dengan cermat. Di satu sisi, masyarakat mungkin resisten terhadap perubahan yang membatasi pilihan atau akses mereka terhadap produk obat dan makanan tertentu. Perubahan perilaku konsumen, kepercayaan terhadap regulasi, serta persepsi risiko dan manfaat, semua berkontribusi terhadap kompleksitas dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima secara luas. Kebijakan yang tidak diterima dengan baik oleh masyarakat dapat mengakibatkan reaksi negatif dan mengurangi efektivitas kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan kesehatan publik yang diinginkan.

Di sisi lain, penerimaan industri terhadap kebijakan tersebut juga penting. Kebijakan dapat dilihat sebagai pembatasan yang mengurangi profitabilitas atau menghambat inovasi dalam industri

obat dan makanan. Tantangan dalam memastikan kepatuhan industri, terutama mengingat keragaman kapasitas antara perusahaan besar hingga UMKM, memerlukan pendekatan yang bijaksana dalam formulasi kebijakan. Kebutuhan adaptasi yang mungkin memerlukan perubahan dalam proses produksi, pengemasan, atau pemasaran, serta investasi besar atau perubahan signifikan dalam waktu singkat, menambah kompleksitas dalam memastikan bahwa kebijakan tidak hanya efektif tetapi juga realistis untuk diikuti oleh industri. Resistensi dari industri, jika tidak dikelola dengan baik, dapat menghambat proses inovasi dan pertumbuhan ekonomi dalam sektor obat dan makanan. Oleh karena itu, menciptakan kebijakan yang mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan kesehatan publik dan keberlanjutan industri merupakan salah satu tantangan terbesar bagi BPOM, yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi ancaman serius dalam analisis SWOT lembaga.

5. Krisis kesehatan global

Keadaan yang tidak biasa yang tidak hanya menyebabkan penyakit tetapi juga kematian, seperti pandemi, merupakan salah satu ancaman paling signifikan yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam konteks analisis SWOT. Dalam keadaan krisis ini, BPOM diharapkan menjadi Lembaga yang dapat bertindak cepat, efektif dan responsive. Misalnya pada bagian mengawasi dan menyetujui obat-obatan serta vaksin baru dengan lebih cepat dari biasanya tanpa mengesampingkan standar keamanan dan efikasi yang tepat. Maka dari itu BPOM diharapkan memiliki sistem yang fleksibel dan adaptif, serta memiliki kemampuan untuk mengalokasikan sumber daya yang tepat untuk mengatasi hal yang menjadi prioritas yang berubah-ubah.

Selain itu, BPOM diharapkan untuk meningkatkan komunikasi publiknya untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada Masyarakat untuk meminimalisir kepanikan dan

menginformasikan mengenai Langkah-langkah keamanan yang tepat. Hal tersebut dibutuhkan untuk menghadapi krisis Kesehatan global dapat meningkatkan risiko terhadap distribusi dan akses terhadap produk obat dan makanan yang aman, memaksa BPOM untuk mengatasi tantangan logistik dan pemantauan pasar yang lebih kompleks. Misalnya, peningkatan permintaan terhadap obat-obatan tertentu atau alat kesehatan dapat memicu risiko penyalahgunaan, penimbunan, atau distribusi produk palsu yang berpotensi merugikan kesehatan masyarakat.

Dengan adanya krisis Kesehatan global, BPOM memerlukan koordinasi yang erat tidak hanya didalam organisasi tetapi juga dengan Lembaga Kesehatan lainnya, baik ditingkat nasional maupun internasional untuk memastikan respons yang komprehensif dan terpadu. Krisis Kesehatan global menyoroti pentingnya kemampuan BPOM untuk beradaptasi dengan situasi darurat, menjadikannya salah satu ancaman utama yang harus dikelola dalam strategi Lembaga.

6. Akselerasi perkembangan teknologi

Perkembangan teknologi yang semakin pesat khususnya dalam bidang bioteknologi dan nanoteknologi membuat baru dalam industri obat dan makanan yang secara fundamental dapat mengubah landscape pasar dan standar produk yang berlaku. Hal ini seringkali tidak sejalan dengan kerangka regulasi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), karena produk baru sering kali mengandung komponen atau mekanisme kerja yang belum pernah ada sebelumnya. Tantangan ini tidak hanya terletak pada aspek keamanan dan efikasi produk, tetapi juga pada kecepatan BPOM untuk menyesuaikan regulasi dan metodologi pengujian untuk menjaga standar keamanan tanpa harus bertentangan dengan perkembangan teknologi yang ada.

Ancaman yang dihadapi BPOM dalam konteks ini mencakup risiko keamanan publik akibat keterlambatan dalam merespons

produk baru, potensi ketidakpastian di kalangan konsumen mengenai keamanan produk, dan kesulitan dalam memprediksi implikasi jangka panjang dari teknologi baru terhadap kesehatan dan keselamatan. Selain itu, kemampuan BPOM dalam memastikan kepatuhan industri terhadap regulasi baru menjadi semakin kompleks, mengingat sifat inovatif dari produk yang mungkin memerlukan pendekatan pengawasan yang belum pernah diterapkan sebelumnya. Ancaman ini memperjelas kebutuhan mendesak untuk sistem regulasi yang tidak hanya adaptif dan fleksibel tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan manfaat teknologi baru secara efektif dan efisien, demi menjaga keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

7. Peningkatan risiko kontaminasi produk

Peningkatan risiko kontaminasi produk menjadi ancaman serius bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dalam konteks pasar yang dinamis, kejadian kontaminasi, baik itu disengaja atau tidak, serta peredaran produk palsu, mengancam keamanan dan kesehatan masyarakat. Risiko ini tidak hanya berpotensi menyebabkan kerugian kesehatan bagi konsumen tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas pasar obat dan makanan. Kepercayaan tersebut merupakan aset penting yang mempengaruhi efektivitas BPOM dalam menjalankan perannya sebagai pengawas obat dan makanan.

Salah satu agenda prioritas nasional dari pemerintah yaitu program Makan Bergizi Gratis. Program ini melibatkan rantai yang panjang dan kompleks, mulai dari penerimaan bahan baku, proses produksi, hingga distribusi ke penerima manfaat. Panjangnya rantai pangan meningkatkan risiko terhadap keamanan produk salah satunya produk menjadi rentan terkontaminasi.

Kontaminasi terhadap produk dari program MBG dapat mengakibatkan kejadian luar biasa keamanan pangan. Agar hal tersebut tidak terjadi BPOM memiliki peran vital dalam mengawal

keamanan dan mutu pangan pada program MBG melalui strategi pengawasan yang sistematis, terintegrasi, dan berbasis risiko

8. Perubahan demografi dan epidemiologi

Perubahan demografi dan epidemiologi merupakan salah satu ancaman untuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Dinamika populasi, termasuk penambahan usia rata-rata, pertumbuhan populasi, dan pergeseran pola penyakit, secara signifikan mempengaruhi jenis dan jumlah produk obat serta makanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh, penuaan populasi (ageing population) dapat meningkatkan permintaan terhadap obat-obatan yang berkaitan dengan kondisi kesehatan kronis, sedangkan perubahan pola penyakit, seperti meningkatnya prevalensi diabetes atau penyakit jantung, memerlukan penyesuaian dalam pengawasan produk makanan dan obat-obatan yang beredar di pasaran.

Ancaman ini menggarisbawahi tantangan bagi BPOM dalam menyesuaikan prioritas pengawasan dan regulasi untuk menjawab kebutuhan yang berubah-ubah tersebut. Kebutuhan untuk memonitor dan mengatur produk baru atau yang sudah ada menjadi lebih kompleks seiring dengan pergeseran kebutuhan masyarakat. Selain itu, perubahan epidemiologi, seperti munculnya penyakit menular baru atau kebangkitan penyakit yang sebelumnya terkendali, menuntut respons yang cepat dan adaptif dari BPOM untuk mengurangi risiko terhadap kesehatan masyarakat. Ancaman ini membutuhkan pemahaman yang mendalam dan terkini tentang tren kesehatan dan demografi untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan BPOM tetap relevan dan efektif dalam melindungi kesehatan publik di tengah dinamika yang terus berubah.

9. Ancaman bioterorisme

Ancaman bioterorisme, yang mencakup risiko penggunaan produk obat dan makanan sebagai medium untuk aksi bioterorisme, merupakan salah satu tantangan serius yang dihadapi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ancaman ini menggarisbawahi perlunya sistem pengawasan dan deteksi yang canggih dan efektif untuk mengidentifikasi serta mencegah potensi ancaman terhadap keamanan nasional dan kesehatan masyarakat. Bioterrorisme dapat mengancam tidak hanya kesehatan individu melalui paparan terhadap agen patogenik, tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan dan ketidakpercayaan publik terhadap keamanan pasokan makanan dan obat-obatan.

Dalam menghadapi ancaman ini, BPOM dihadapkan pada tantangan untuk memperkuat kerangka kerja regulasi dan pengawasan, termasuk pengembangan kemampuan laboratorium untuk pengujian patogen secara cepat dan akurat. Ancaman bioterorisme membutuhkan koordinasi lintas sektor dan kerjasama internasional untuk pertukaran informasi dan praktek terbaik dalam deteksi dini dan respons terhadap ancaman.

Keterbatasan dalam teknologi deteksi dan sistem pemantauan yang ada dapat meningkatkan kerentanan terhadap aksi bioterorisme, menuntut peningkatan investasi dalam teknologi pengawasan dan pengembangan protokol respons yang efektif. Tanpa pengawasan yang adekuat, risiko bioterorisme dapat mengancam integritas sistem kesehatan publik dan kepercayaan konsumen terhadap keamanan produk obat dan makanan.

10. Akses transportasi yang masih terbatas

Terbatasnya akses transportasi menuju wilayah pengawasan, khususnya daerah terpencil dan perbatasan kabupaten/Kota termasuk daerah pegunungan dan pedesaan dengan infrastruktur jalan yang belum memadai, menyebabkan pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan tidak berjalan optimal. Masih

terdapat daerah di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya yang sulit di akses. Secara geografis wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya terdiri dari pantai dan pegunungan, di daerah-daerah tertentu akses transportasi hanya bisa dilalui oleh kendaraan pribadi. Hal ini berdampak pada sulitnya masyarakat mendapatkan akses informasi mengenai Obat dan Makanan yang aman, serta membatasi proses pengawasan obat dan makanan oleh Balai POM di Tasikmalaya.

Tabel 5. Matriks Ringkasan Analisis SWOT

<i>Strength</i> 1. Komitmen kepemimpinan yang kuat 2. Kerja Sama lintas sektor dan jaringan kerja sama yang solid 3. Memiliki SDM yang Kompeten 4. Kualitas Pelayanan Publik yang Optimal 5. Kelembagaan yang Diperkuat 6. Pemanfaatan Teknologi Informasi	<i>Weakness</i> 1. Jumlah SDM belum memadai dibandingkan dengan cakupan tugas sesuai analisa beban kerja 2. Sarana dan Prasarana belum memadai 3. Kemampuan uji laboratorium belum maksimal. 4. Masih banyaknya kendala dalam penggunaan sistem TI
<i>Opportunities</i> 1. Pertumbuhan Pasar dan Perkembangan UMKM Obat dan Makanan yang sangat pesat di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya 2. Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM 3. Menjalin komunikasi dengan para pemangku kepentingan 4. Kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu semakin meningkat	<i>Threat</i> 1. E-commerce dan kejahatan siber di bidang obat dan makanan 2. Dinamika pasar yang cepat 3. Koordinasi antar lembaga belum sinergis 4. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan 5. Krisis kesehatan global 6. Akselerasi perkembangan teknologi 7. Peningkatan risiko kontaminasi produk 8. Perubahan demografi dan epidemiologi 9. Ancaman bioterorisme 10. Akses transportasi yang masih terbatas

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

II.1. Visi

Balai POM di Tasikmalaya sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit organisasi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan wilayah kerja Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

“Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat

terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. Masyarakat Sehat dan Sejahtera: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi BPOM untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan serta pembinaan kepada industri dan UMKM dalam rangka peningkatan daya saing.

II.2. Misi

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan 4 (empat) misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden terpilih yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi

antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif Balai POM di Tasikmalaya dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, Balai POM di Tasikmalaya berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Sebagai lembaga pemerintah, Balai POM di Tasikmalaya menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata Kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, Balai POM di Tasikmalaya ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

Balai POM di Tasikmalaya sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh pelaksanaan misi BPOM.

II.3. Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.

2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong Masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.
 3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM : Tujuan ini menggaris bawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
 4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.
 5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan dalam memberikan layanan publik yang prima.
- Balai POM di Tasikmalaya sesuai tugas dan fungsinya mendukung seluruh Tujuan BPOM.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggungjawab sebagai pengawas obat dan makanan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 6 berikut:

Tabel 6. Indikator Tujuan BPOM 2025-2029

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1.	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74.75	76.4	77.75	79.45	80.7
2.	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88.20	88.60	88.90	89.20	89.40
3.	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63.6	66.2	69.3	72.7	76.7

	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM						
4.	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74.4	75.9	77.1	78.5	79.9
5.	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96.3	96.35	96.4	96.45	96.5

II.4. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan ini disusun berdasarkan visi dan misi BPOM yang ingin dicapai Balai POM di Tasikmalaya, dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2025-2029) ke depan diharapkan Balai POM di Tasikmalaya akan dapat mencapai sasaran kegiatan sebagai berikut:

SK 1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi masyarakat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai POM di Tasikmalaya berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar

- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder
- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Tasikmalaya
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Tasikmalaya sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK 2: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Pangan fortifikasi adalah makanan yang telah melalui proses penambahan zat gizi tertentu, untuk meningkatkan kualitas gizinya dan memberikan manfaat kesehatan bagi konsumen. Balai POM di Tasikmalaya berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan

persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

SK 3: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut Balai POM di Tasikmalaya untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. Balai POM di Tasikmalaya harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- a. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya
- b. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- c. Jumlah desa pangan aman
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK 4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, Balai POM di Tasikmalaya berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, Balai POM di Tasikmalaya berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Tasikmalaya.

SK 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, Balai POM di Tasikmalaya mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem

pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK 7: Layanan Publik Balai POM di Tasikmalaya yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Balai POM di Tasikmalaya berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tasikmalaya.

SK 8: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan Balai POM di Tasikmalaya merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Tasikmalaya
- b. Nilai AKIP Balai POM di Tasikmalaya
- c. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tasikmalaya
- d. Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tasikmalaya

Tabel 7. Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Tasikmalaya periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: <i>1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> <i>2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> <i>3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> <i>4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya Indikator: <i>1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> <i>3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> <i>5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		<i>Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan 6. Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan	7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 8. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 11. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan 12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar 13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Tasikmalaya 14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan Balai POM di Tasikmalaya sesuai Standar Kemampuan Laboratorium 15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029) Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Indikator:

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			<i>Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya Indikator: <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM di Tasikmalaya</i> Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya Indikator: <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu Indikator:

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM Indikator: <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	<i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator:	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu Indikator: <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap</i>	Meningkatnya efektivitas KIE Indikator: <i>1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
bersama seluruh pemangku kepentingan	<i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	<i>Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	2. Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan 3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator: <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik Balai POM di Tasikmalaya yang prima Indikator: <i>Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Tasikmalaya</i>
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Tasikmalaya 2. Nilai AKIP Balai POM di Tasikmalaya 3. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Tasikmalaya 4. Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Tasikmalaya

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis Balai POM di Tasikmalaya 2025-2029 secara optimal, perlu dilakukan identifikasi risiko dari setiap sasaran strategis tersebut. Melalui identifikasi risiko, berbagai potensi hambatan dan tantangan yang mungkin muncul selama pelaksanaan program dapat dikenali sejak dini. Hal ini memungkinkan Balai POM di Tasikmalaya untuk mengambil langkah antisipatif dan strategi mitigasi yang tepat, sehingga mendukung tercapainya sasaran strategis dengan lebih efektif dan efisien. Identifikasi risiko tentunya disusun sebagai bagian integral dari proses perencanaan strategis, guna memastikan pengelolaan risiko yang sistematis dan terukur dalam mendukung kinerja organisasi. Berikut adalah identifikasi indikasi risiko sasaran strategis Balai POM di Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam tabel 8.

Tabel 8. Indikasi Risiko Sasaran Strategis BPOM di Tasikmalaya

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Tingginya peredaran produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	a. Mengoptimalkan perencanaan, monitoring dan evaluasi terhadap rencana pemeriksaan sarana dan produk di Balai POM di Tasikmalaya b. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha baik produksi maupun distribusi untuk melaksanakan kegiatan sesuai	Fungsi Pemeriksaan

			dengan peraturan melalui pemeriksaan rutin.	
		Pelaku usaha dan/atau lintas sektor tidak merespon CAPA hasil tindak lanjut	Mengirimkan surat penagihan CAPA dan diadakan kegiatan desk CAPA dengan petugas	Fungsi Pemeriksaan
		Kemampuan uji belum sesuai dengan standar pengawasan obat dan makanan	a. Pemenuhan peralatan dan reagen pengujian sesuai dengan standar b. Meningkatkan kemampuan personil pengujian c. Melakukan sertifikasi laboratorium ISO 17025 untuk pemenuhan standar ruang lingkup	Fungsi Pengujian
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Pelaku usaha pangan fortifikasi tidak menerapkan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik	Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha melalui pemeriksaan rutin dan kegiatan bimtek	Fungsi Infokom

3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingginya informasi tidak benar (<i>hoaks</i>) seputar Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat	a. Mengoptimalkan perencanaan, monitoring dan evaluasi KIE baik tatap muka dan non tatap muka b. Memanfaatkan KIE melalui media sosial Balai POM di Tasikmalaya untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit diakses	Fungsi Infokom
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Rendahnya kesadaran pelaku usaha dalam menerapkan Cara Produksi yang Baik secara konsisten sesuai ketentuan	a. Memberikan fasilitasi terhadap pelaku usaha secara luring maupun daring b. Melaksanakan bimbingan teknis bagi pelaku usaha dalam proses penerapan standar keamanan dan mutu.	Fungsi Infokom
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Pelaksanaan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan tidak berjalan lancar	a. Memastikan kerahasiaan pada saat perencanaan operasi penindakan maupun saat investigasi awal	Fungsi Penindakan

	efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya		b. Meningkatkan kerjasama dengan korwas PPNS dalam proses penindakan dan penyidikan c. Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan criminal justice sytem di wilayah Balai POM di Tasikmalaya dalam penyelesaian perkara	
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	Sumber informasi yang di dapatkan tidak kredibel	Melakukan konfirmasi dengan narasumber/ahli di bidangnya	Fungsi Penindakan
7	Layanan Publik UPT yang prima	Pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar	a. Melengkapi fasilitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Fungsi Tata Usaha

		pelayanan yang telah ditetapkan	Balai POM di Tasikmalaya b. Meningkatkan kompetensi petugas pelayanan publik c. Membuat inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat	
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Adanya praktik penerimaan gratifikasi maupun penyalahgunaan wewenang oleh petugas Balai POM di Tasikmalaya saat melaksanakan tugas	Memberikan informasi kepada pelaku usaha dan vendor pihak ketiga bahwa petugas menolak gratifikasi, melakukan sosialisasi terkait pengendalian gratifikasi kepada pegawai, membuat laporan monitoring pengendalian gratifikasi yang diverifikasi oleh tim Pokja Pengawasan Balai POM di Tasikmalaya setiap triwulan dan dilaporkan kepada Inspektorat	Fungsi Tata Usaha

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1. Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang Obat dan Makanan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin. Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relative pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap

bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran Obat dan Makanan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang obat dan makanan, baik *online* maupun *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan *regulatory assistance* untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui *reliance* serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di Tingkat Nasional maupun Internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi

dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan *premarket dan post market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

III.2. Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Tasikmalaya

Balai POM di Tasikmalaya mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM sebagai berikut :

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG.
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*.
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Strategi Pengawasan Obat dan Makanan 2025-2029 Balai POM di Tasikmalaya untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan yang komprehensif (*full spectrum*) berbasis risiko.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peranserta masyarakat dalam pengawasansediaan farmasi dan pangan olahan.
5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 9. Matriks Pemetaan Arah Kebijakan dan Strategi

Arah Kebijakan	Strategi
Penguatan pengawasan <i>pre-post market</i> Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	Penguatan pengawasan yang komprehensif (<i>full spectrum</i>) berbasis risiko
Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan <i>regulatory assistance</i> dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.

Arah Kebijakan	Strategi
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data.
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Pemenuhan jumlah SDM sesuai beban kerja untuk meningkatkan jangkauan pengawasan

Sejalan dengan arah kebijakan dan strategi BPOM, maka implementasi arah kebijakan dan strategi Balai POM di Tasikmalaya juga dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial. Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia dan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana BPOM.

1. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya mencakup pengawasan *pre-market* dan *post-market* terhadap sediaan farmasi

serta pangan olahan, termasuk pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pengawasan *pre-market* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tanpa mencakup penyusunan standar. Selain kegiatan pengawasan tersebut, Balai POM di Tasikmalaya juga melaksanakan berbagai upaya pendukung seperti pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi, serta kerja sama lintas sektor guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan perlindungan konsumen. Sebagai satuan kerja di daerah, Balai POM di Tasikmalaya tidak hanya berfokus pada pelaksanaan tugas teknis pengawasan, tetapi juga menjalankan fungsi manajerial dan administrasi sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPOM. Melalui pelaksanaan kegiatan yang terintegrasi tersebut, diharapkan pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan untuk menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk yang beredar di masyarakat.

a. Pengawasan Obat dan Makanan

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Tasikmalaya mencakup pengawasan *pre* dan *post market*. Namun dalam hal ini *pre-market control* dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM.

b. Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan

Dalam mengatasi berbagai tantangan yang muncul, terutama terkait kesehatan masyarakat dan pengendalian penyebaran

produk obat dan makanan tidak memenuhi syarat, meningkatkan koordinasi lintas sektor dilakukan BPOM dalam memperkuat pengawasan produk obat dan makanan.

c. Pengawasan Produksi Obat dan Makanan

Pengawasan Produksi Obat dan Makanan dilaksanakan dalam upaya untuk meningkatkan perlindungan kepada masyarakat serta daya saing sediaan farmasi dan pangan olahan. Program prioritas pada periode Renstra 2025-2029 dilaksanakan dalam kerangka mewujudkan kepatuhan dan kemandirian pelaku usaha dengan tetap berpihak pada UMK. Sebagaimana diketahui bahwa jaminan terhadap mutu dan keamanan pangan merupakan tanggung jawab utama dari pelaku usaha (produsen).

d. Pengawasan Peredaran Obat dan Makanan

Balai POM di Tasikmalaya memiliki tugas melaksanakan supervisi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang peredaran obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan.

e. Pengujian Obat dan Makanan

Pelaksanaan pengujian sampel Obat dan Makanan dilakukan guna memastikan produk yang beredar di masyarakat memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat yang telah ditetapkan. Balai POM di Tasikmalaya melaksanakan pengujian kimia dan mikrobiologi namun terbatas untuk jenis produk tertentu. Dengan penguatan di bidang pengujian ini, Balai POM di Tasikmalaya berupaya memberikan perlindungan yang optimal kepada masyarakat melalui pengawasan produk yang beredar di wilayahnya.

f. Penguatan Pengawasan Post Market Iklan dan Penandaan Obat

Penguatan pengawasan post market terhadap iklan dan penandaan obat sangat penting untuk memastikan informasi yang tepat dan aman bagi konsumen dalam rangka meningkatkan koordinasi guna mengoptimalkan kinerja Balai

POM di Tasikmalaya dalam pengawasan iklan dan penandaan obat yang beredar.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat dan Makanan

Merupakan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terkait keamanan dan mutu obat dan makanan melalui program Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta pendampingan UMKM.

h. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Obat dan Makanan

a) Operasi Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal

Operasi penindakan dan operasi kolaboratif merupakan bentuk tanggung jawab Balai POM di Tasikmalaya untuk menjamin keamanan Obat dan Makanan yang beredar di Masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkaya data hasil penindakan yang sangat penting untuk mengungkap modus operandi dan aktor intelektual kejahatan berjejaringan. Intensifikasi operasi penindakan dan operasi kolaboratif bersama dengan stakeholder terhadap dugaan tindak pidana di Bidang Obat dan Makanan merupakan bagian penting untuk mendukung kegiatan penyidikan guna tercapainya program pengawasan obat dan makanan.

b) Perkuatan Koordinasi dengan *Criminal Justice System*

Perkuatan koordinasi dan komunikasi dalam rangka upaya penegakkan hukum tindak pidana obat dan makanan dilakukan oleh PPNS Badan POM bersama ICJS yang berkaitan dengan penindakan seperti Biro Korwas PPNS Bareskrim POLRI, Kejaksaan Agung, Ditjen Bea Cukai, dan lain-lain. Perkuatan Kegiatan Penyidikan di Bidang Obat dan Makanan bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang memadai mengenai isu dan kendala penyidikan serta sebagai wadah perkuatan komunikasi dalam melaksanakan penegakkan hukum tindak pidana obat dan makanan oleh PPNS Badan POM bersama ICJS.

c) Peningkatan Kinerja Penyidikan Obat dan Makanan

Seiring berjalannya waktu, dalam menghadapi dinamika perubahan perlu dilakukan peningkatan kompetensi pegawai yang disesuaikan dengan kebutuhan Penyidikan Obat dan Makanan, untuk itu dialokasikan anggaran untuk pegawai mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.

d) Pelayanan Publik

Dalam meningkatkan kinerja pelayanan publik, Balai POM di Tasikmalaya harus melakukan perbaikan secara terus menerus terutama dalam memenuhi kebutuhan dan kepuasan pengguna layanan. Berbagai cara dilakukan untuk perbaikan layanan, diantaranya penyederhanaan prosedur pelayanan, penerapan standar layanan, menjangkau masukan perbaikan melalui survei kepuasan masyarakat, pemenuhan penyelenggaraan pelayanan publik termasuk pemenuhan sarana prasarana ramah kelompok rentan dan penanganan pengaduan serta pengembangan inovasi untuk percepatan pelaksanaan layanan.

2. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya berfokus pada pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), pelaksanaan belanja pegawai yang meliputi pembayaran gaji, serta pelaksanaan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan terselenggaranya dukungan operasional yang optimal dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya. Melalui pengelolaan yang efektif dan efisien, kegiatan ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta terciptanya

lingkungan kerja yang kondusif bagi pelaksanaan kegiatan pengawasan.

a. Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

1) Pembangunan zona integritas Badan POM menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Menciptakan kinerja organisasi yang bebas dari korupsi merupakan dampak sekaligus tujuan utama dari pelaksanaan island of integrity yang diharapkan dapat menciptakan sumber daya organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi. Dampak lainnya adalah efisiensi yang lebih besar karena organisasi mampu menciptakan organisasi yang lebih efisien atau dengan menggunakan sumber daya yang lebih minimal dapat menghasilkan output yang lebih optimal. Dalam upaya mempengaruhi sistem yang lebih luas, unit organisasi yang melaksanakan island of integrity diharapkan dapat menularkan virus keberhasilan untuk mempengaruhi sistem organisasi yang lebih luas dan mampu menghasilkan lebih banyak lagi unit organisasi yang memiliki Zona Integritas (ZI). Langkah maju dari penerapan Zona Integritas adalah program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Kedua program ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan efektif. WBK adalah level advanced dari penerapan ZI. Sedangkan WBBM merupakan level lanjutan dengan standar yang lebih tinggi daripada WBK. Kedua program tersebut merupakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif. Melalui program-program ini, diharapkan bahwa masyarakat akan merasakan manfaat nyata dari pelayanan publik yang lebih baik dan birokrasi yang lebih melayani. Penerapan Zona Integritas berperan sebagai alat yang ampuh untuk mendorong

tata kelola yang baik, meningkatkan kepercayaan publik, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan di Indonesia. Dengan menumbuhkan budaya integritas, akuntabilitas, dan transparansi, ZI berkontribusi pada pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berpusat pada warga negara.

2) Penguatan Manajemen Risiko dan Kapabilitas APIP

Manajemen risiko merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin terjadi dalam sebuah organisasi atau instansi. Dalam konteks instansi pemerintah, manajemen risiko menjadi semakin penting mengingat adanya tuntutan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Penerapan manajemen risiko dapat membantu instansi pemerintah dalam mengelola risiko yang muncul dan menghindari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai salah satu acuan/kebijakan terkait penerapan manajemen risiko, untuk mewujudkan Pengendalian Intern Pemerintah yang memadai diperlukan adanya peningkatan efektivitas Manajemen Risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah dimulai dari identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reuiu.

BPOM selalu memiliki komitmen untuk mencapai salah satu tujuan dari penerapan manajemen risiko yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dengan mengoptimalkan Konsep Three Lines Model dalam proses manajemen risiko serta belajar terus-menerus untuk peningkatan efektivitas Manajemen Risiko. Dalam proses penerapan manajemen risiko, Balai POM di Tasikmalaya melakukan identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, serta pemantauan dan reuiu

risiko minimal setiap semester. Selanjutnya dokumen manajemen risiko yang telah disusun oleh unit kerja akan direviu oleh Auditor Internal Sistem Manajemen Terintegrasi selaku lini kedua pada saat pelaksanaan audit internal Sistem Manajemen Terintegrasi.

Selanjutnya, kapabilitas dan efektivitas merupakan dua indikator penting untuk melihat sejauh mana APIP sebagai institusi telah mampu mendefinisikan peran pengawasan intern dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Peran utama sebagai mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan yang telah kami lakukan (GRCC –*Governance, Risk, Control, and Compliance*) secara berkelanjutan mendukung tercapainya sasaran prioritas nasional dan tujuan organisasi melalui *early warning system* secara akuntabel, efektif, efisien, dan *reliable*. Oleh karena itu, orkestrasi yang seirama sejak mulai perencanaan program, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasannya harus terkelola dengan sangat baik dalam rangka mencapai tujuan tersebut. Fungsi yang semula *quality assurance*, secara bertahap, konsisten, dan berkesinambungan, bergeser dan mewujudkan menjadi *trusted advisor* (bekerja dengan *data analytics*) dan *value driver* (bekerja dengan *data modelling*) yang bukan hanya sekedar *protecting value*, tetapi juga *enhancing value*. APIP BPOM juga terus mengasah kemampuan *insight*, *hindsight* dan juga *foresight*, namun tetap memegang teguh prinsip obyektif dan independen.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1. Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh BPOM di Tasikmalaya untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan BPOM dalam memperkuat pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi BPOM, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih BPOM di Tasikmalaya selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama BPOM, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di BPOM diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 10. Matriks Kerangka Kinerja BPOM 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan	Persentase Sampel Sediaan Farmasi berisiko yang	82,5	84	85,5	87	88,5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26	27	28	29	30
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	75	77	79	81	83
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	82	83	84	85	86
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa	93	94	95	96,5	97,5

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91	92	93	94	95
		Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,63	95,50	96,38	97,25	98,13
		Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90	91	92	93	94
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	91	92	93	94	95

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Presentase Label Produk Tembakau Dan/Atau Rokok Elektronik Yang Diawasi Sesuai Standar Kententuan	80	81	82	83	84
		Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR Di Wilayah UPT	100	100	100	100	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	14	16	19	22	25
		Presentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	20	40	40	60	80
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	81	82	83	84

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase Cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	60	80	80	100	100
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	86,04	86,90	87,76	88,62	89,48
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	4	6	6	6	6
		Jumlah desa pangan aman	1	2	3	3	3
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	1	1	1	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA,	16	34	54	76	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	keamanan dan mutu	Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan					
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	83	84	85	86	87
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja Balai POM di Tasikmalaya	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	90	91	92	93	94
7	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,40	4,45	4,50	4,55	4,60

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
8	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	76	77	78	79	80
		Nilai AKIP UPT BPOM	78,50	79,10	79,70	80,30	80,90
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,85	2,87	2,90	2,95	3,00

IV.2. Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan terlampir dalam matriks berikut.

Tabel 11. Kerangka Pendanaan Balai POM di Tasikmalaya 2025-2029 Berdasarkan Program

Kegiatan	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,688	3,873	4,066	4,270	4,483
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	32,742	34,379	36,098	37,903	39,798
TOTAL	36,430	38,252	40,164	42,173	44,281

**Tabel 12. Kerangka Pendanaan Balai POM di Tasikmalaya 2025-2029
Berdasarkan Sumber Dana**

Sumber Dana	Alokasi (Rp Juta)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	36,430	38,252	40,164	42,173	44,281
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	0	0	0	0	0
TOTAL	36,430	38,252	40,164	42,173	44,281

Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan BPOM dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPOM yang ingin dicapai. Pada akhir 2025-2029, BPOM diharapkan mampu:

1. Meningkatkan efektifitas pengawasan bersama lintas sektor dalam mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu
2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan KIE guna mewujudkan masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu melalui program
3. Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan anan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM melalui berbagai kegiatan pembinaan/regulatory assistance yang diberikan kepada pelaku usaha
4. Meningkatkan perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui penyelenggaraan fungsi deteksi kejahatan dan penyidikan yang optimal.
5. Mewujudkan BPOM sebagai organisasi yang profesional, adaptif, efektif dan efisien serta memberikan layanan publik yang prima.

BAB V

PENUTUP

Renstra BPOM 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang selaras dengan amanah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, serta selaras dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Renstra BPOM di Tasikmalaya 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di lingkungan BPOM di Tasikmalaya baik untuk perencanaan menengah dan tahunan. Untuk memastikan Renstra yang disusun dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi Renstra BPOM secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Renstra BPOM di Tasikmalaya Tahun 2025-2029 harus dijadikan acuan kerja bagi unit kerja di lingkungan di BPOM di Tasikmalaya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Tasikmalaya, 05 Desember 2025
Kepala Balai POM di Tasikmalaya,



Iltizam Nasrullah, S.Si, Apt., M.Si

LAMPIRAN

Lampiran I. Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai POM di Tasikmalaya								36,430	38,252	40,164	42,173	44,281	UPT BPOM	
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia								32,742	34,379	36,098	37,903	39,798	UPT BPOM	
	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tasikmalaya	82,5	84	85,5	87	88,5						UPT BPOM
	2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Balai POM di Tasikmalaya	26	27	28	29	30						UPT BPOM
	3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tasikmalaya	75	77	79	81	83						UPT BPOM
	4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Balai POM di Tasikmalaya	100	100	100	100	100						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tasikmalaya	85	87	89	92	95						UPT BPOM
	6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Balai POM di Tasikmalaya	82	83	84	85	86						UPT BPOM
	7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tasikmalaya	93	94	95	96,5	97,5						UPT BPOM
	8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tasikmalaya	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tasikmalaya	94,63	95,5	96,38	97,25	98,13						UPT BPOM
	10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tasikmalaya	90	91	92	93	94						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Balai POM di Tasikmalaya	91	92	93	94	95						UPT BPOM
	12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Balai POM di Tasikmalaya	80	81	82	83	84						UPT BPOM
	13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Balai POM di Tasikmalaya	100	100	100	100	100						UPT BPOM
	14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Balai POM di Tasikmalaya	14	16	19	22	25						UPT BPOM
	15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Balai POM di Tasikmalaya	20	40	40	60	80						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	16	Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tasikmalaya	0	81	82	83	84						UPT BPOM
	RO 1: Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans		Balai POM di Tasikmalaya	45	45	45	45	45						UPT BPOM
	RO 2: Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai POM di Tasikmalaya	125	125	125	125	125						UPT BPOM
	RO 3: Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT		Balai POM di Tasikmalaya	250	252	263	279	294						UPT BPOM
	RO 4: Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai POM di Tasikmalaya	38	41	44	48	52						UPT BPOM
	RO 5: Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT		Balai POM di Tasikmalaya	371	411	447	487	528						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 6: Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa yang diperiksa sesuai standar oleh UPT BPOM		Balai POM di Tasikmalaya	144	144	144	144	144						UPT BPOM
	RO 7: Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia		Balai POM di Tasikmalaya	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 8: Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Balai POM di Tasikmalaya	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 9: Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium		Balai POM di Tasikmalaya	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 10: Sampel Makanan Bergizi Gratis yang diuji sesuai standar		Balai POM di Tasikmalaya	0	443	443	443	443						UPT BPOM
	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi		Balai POM di Tasikmalaya											
	1	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Balai POM di Tasikmalaya	60	80	80	100	100						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT		Balai POM di Tasikmalaya	3	4	4	5	5						UPT BPOM
	Meningkatnya efektivitas KIE													
	1	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Balai POM di Tasikmalaya	86,04	86,9	87,76	88,62	89,48						UPT BPOM
	2	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Balai POM di Tasikmalaya	4	6	6	6	6						UPT BPOM
	3	Jumlah desa pangan aman	Balai POM di Tasikmalaya	1	2	3	3	3						UPT BPOM
	4	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Balai POM di Tasikmalaya	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 1: Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE		Balai POM di Tasikmalaya	95	291	330	352	388						UPT BPOM, Dit. PMPU OTSKK, & Dit. PMPU Pangan Olahan
	RO 2: Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT		Balai POM di Tasikmalaya	20	12	16	18	20						UPT BPOM
	RO 3: Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan		Balai POM di Tasikmalaya	4	6	6	6	6						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 4: Desa Pangan Aman		Balai POM di Tasikmalaya	1	2	3	3	3						UPT BPOM
	RO 5: Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas		Balai POM di Tasikmalaya	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu													
	1	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Balai POM di Tasikmalaya	16	34	54	76	100						UPT BPOM
	RO 1: UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT		Balai POM di Tasikmalaya	8	9	10	11	12						UPT BPOM
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Balai POM di Tasikmalaya	83	84	85	86	87						UPT BPOM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/ Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 1: Perkara di bidang Penyidikan Obat dan Makanan		Balai POM di Tasikmalaya	2	2	2	2	3						UPT BPOM
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT													
	1	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Balai POM di Tasikmalaya	90	91	92	93	94						UPT BPOM
	RO 1: Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT		Balai POM di Tasikmalaya	14	14	15	15	15						UPT BPOM
	Layanan Publik UPT yang prima													
	1	Indeks Pelayanan Publik UPT	Balai POM di Tasikmalaya	4,4	4,45	4,5	4,55	4,6						UPT BPOM
	RO 1: Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT		Balai POM di Tasikmalaya	21	33	38	46	45						UPT BPOM
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal													

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output		Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
									(Dalam Juta Rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	1	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Balai POM di Tasikmalaya	76	77	78	79	80						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	2	Nilai AKIP UPT BPOM	Balai POM di Tasikmalaya	78,5	79,1	79,7	80,3	80,9						UPT BPOM
	3	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Balai POM di Tasikmalaya	5	5	5	5	5						UPT BPOM
	4	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Balai POM di Tasikmalaya	2,85	2,87	2,9	2,95	3						UPT BPOM dan Direktorat Kedeputian 1,2,3,4
	RO 1: Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Balai POM di Tasikmalaya	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 2: Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia		Balai POM di Tasikmalaya	1	1	1	1	1						UPT BPOM dan Deputi 1,2,3,4
	RO 3: Perangkat pengolah data dan komunikasi		Balai POM di Tasikmalaya	7	8	19	12	14						UPT BPOM
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM									3,688	3,873	4,066	4,270	4,483	

Kegiatan	Sasaran Kegiatan/Indikator/Rincian Output	Lokasi	Target					Alokasi					Unit Organisasi Pelaksana
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	RO 4: Layanan BMN Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Balai POM di Tasikmalaya	1	1	1	1	1						UPT BPOM
	RO 5: Layanan Perkantoran Cat: Mendukung SK "Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal"	Balai POM di Tasikmalaya	1	1	1	1	1						UPT BPOM

